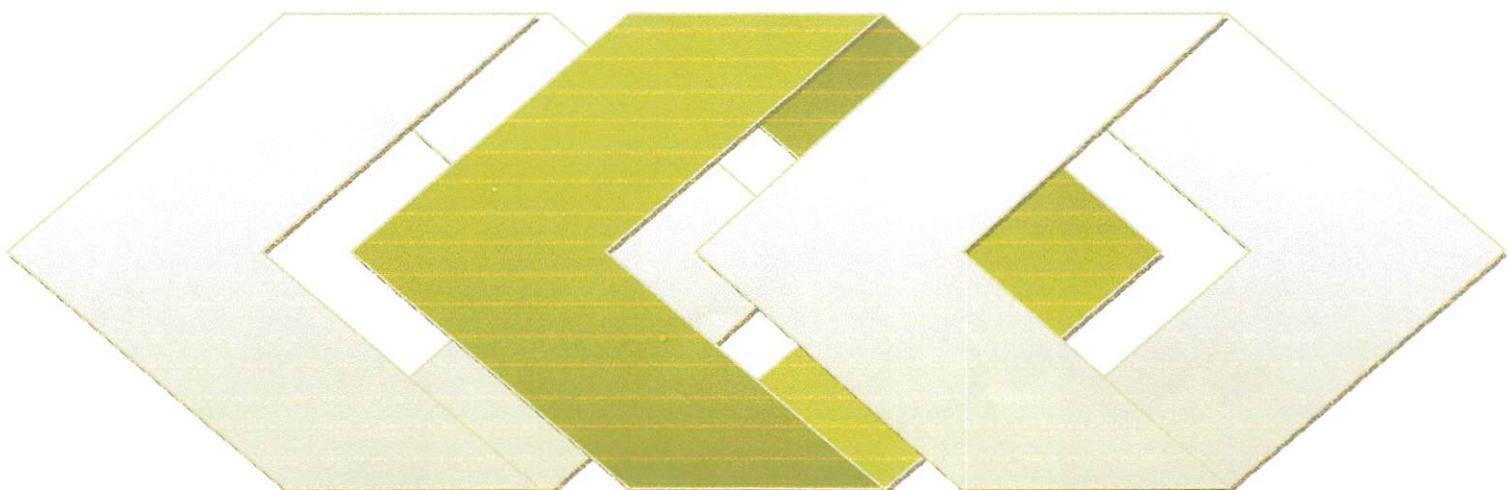


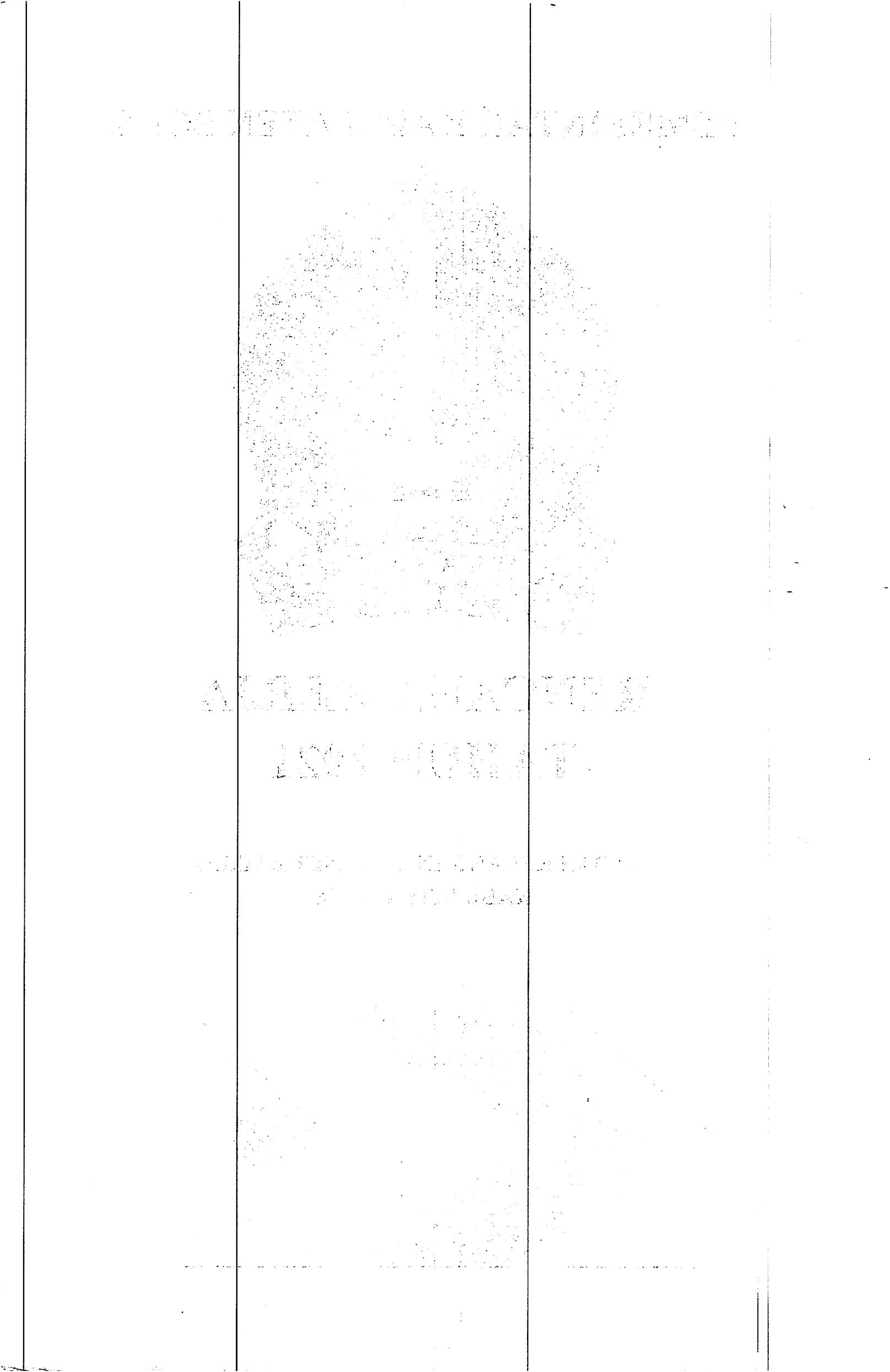
**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**



**RENCANA KERJA  
TAHUN 2021**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BONE**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah

1980

17 October 1980

Case Report

A 22-year-old male with a history of recurrent oral ulcers and a 10-year history of ulcerative colitis was admitted to the hospital with a 10-day history of fever, abdominal pain, and diarrhea. He had been taking sulfasalazine and prednisone for his ulcerative colitis. His symptoms had been well controlled until 2 weeks prior to admission, when he developed a fever, abdominal pain, and diarrhea. He had been taking sulfasalazine and prednisone for his ulcerative colitis. His symptoms had been well controlled until 2 weeks prior to admission, when he developed a fever, abdominal pain, and diarrhea. He had been taking sulfasalazine and prednisone for his ulcerative colitis. His symptoms had been well controlled until 2 weeks prior to admission, when he developed a fever, abdominal pain, and diarrhea. He had been taking sulfasalazine and prednisone for his ulcerative colitis. His symptoms had been well controlled until 2 weeks prior to admission, when he developed a fever, abdominal pain, and diarrhea.

He had a 10-year history of ulcerative colitis, which was well controlled with sulfasalazine and prednisone. He had no other significant medical history, past or present, and no family history of ulcerative colitis.

Physical examination revealed a febrile patient with diffuse tenderness in the right lower quadrant and mild hepatomegaly.

Initial laboratory studies showed a white blood cell count of 12,000/mm<sup>3</sup>, a hemoglobin level of 10.5 g/dL, a platelet count of 150,000/mm<sup>3</sup>, and a serum creatinine level of 1.2 mg/dL. A stool sample was positive for occult blood. A liver function test showed a serum bilirubin level of 1.2 mg/dL, an alkaline phosphatase level of 120 U/L, and a serum transaminase level of 100 U/L. A urinalysis was normal. A chest x-ray was normal. A liver biopsy was performed.

The liver biopsy showed noncaseating granulomas, which were consistent with sarcoidosis. The patient was started on prednisone at a dose of 60 mg/day. His fever subsided, and his abdominal pain improved. He was discharged home on prednisone 60 mg/day and sulfasalazine 1 g/day.

After discharge, the patient developed a fever and abdominal pain. He was readmitted to the hospital and found to have a fever of 102°F, a white blood cell count of 15,000/mm<sup>3</sup>, and a serum creatinine level of 2.5 mg/dL.

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang keuangan daerah.

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- OPD.

## 1. 2. Landasan Hukum

Bawa penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone mengacu pada:

1. Undang- Undang Nomor 29 tahun 1959 tetang pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

the right approach? Given that much of the work done on this topic has been done by scholars who have not been involved in the actual implementation of the policy, it is not surprising that there has been a lack of agreement on what the best approach is. This is particularly true when it comes to the question of how to measure the success of such policies. Some scholars argue that the best way to evaluate the effectiveness of a policy is to look at its impact on the economy as a whole, while others believe that it is more important to focus on specific outcomes, such as employment rates or income inequality. Still others argue that the most important factor is the overall well-being of society, and that economic growth should be seen as a means to achieve this goal. In addition to these different perspectives, there are also significant differences in terms of the specific goals of the policies themselves. Some scholars argue that the primary goal should be to reduce poverty and inequality, while others believe that the main objective should be to promote economic growth and development. There are also different views on the best way to achieve these goals, with some advocating for a more centralized approach, while others believe in a more decentralized, market-oriented approach. Overall, the debate over the best approach to poverty reduction is complex and multifaceted, reflecting the diverse nature of the problem and the different perspectives of those involved.

Chlorophyll a, b and pheophytin

生地圖》所著，該書「開拓」了新北市的山林水脈，並提出山海兩脈

It is not clear whether or not the "soft" model would predict a different outcome than the "hard" model. The reason is that the relevant parameters in the two models are not the same. In the soft model, the parameter  $\alpha$  is the probability of a mutation occurring at a site, while in the hard model it is the probability of a mutation being detected. This difference is important because the probability of a mutation being detected depends on the detection method used. For example, if a mutation is detected by sequencing, the probability of detection is high, but if it is detected by a less sensitive method, such as a polymerase chain reaction (PCR), the probability of detection is lower. Therefore, the "soft" model would predict a higher rate of mutation than the "hard" model if the detection method used is less sensitive.

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Tenrang Perubaha kedua atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor5679)
  6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perauran Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5234)
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 -2032 ( Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2)
  10. Peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 9 tahun 2016 tentang Peruvbahan Atas Persturan daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005- 2025 ( Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9)
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2018 – 2023 ( Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 nomor 3)
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9)
  13. Peraturan Bupati bone nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 55 )
  14. Peraturan Bupati Bone nomor 87, Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Persaturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Bone Tahun 2020 ( Berita Daerah kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 31)

ellos se consideran como una parte fundamental de la cultura y el desarrollo social. La cultura es la base para la formación de las personas y la construcción de la sociedad. Los sistemas de creencias, valores y normas que se transmiten a través de la cultura son fundamentales para el desarrollo personal y social. La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible. Los sistemas de creencias, valores y normas que se transmiten a través de la cultura son fundamentales para el desarrollo personal y social. La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible. Los sistemas de creencias, valores y normas que se transmiten a través de la cultura son fundamentales para el desarrollo personal y social. La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible. Los sistemas de creencias, valores y normas que se transmiten a través de la cultura son fundamentales para el desarrollo personal y social. La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible. Los sistemas de creencias, valores y normas que se transmiten a través de la cultura son fundamentales para el desarrollo personal y social. La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible. Los sistemas de creencias, valores y normas que se transmiten a través de la cultura son fundamentales para el desarrollo personal y social. La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible. Los sistemas de creencias, valores y normas que se transmiten a través de la cultura son fundamentales para el desarrollo personal y social. La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible. Los sistemas de creencias, valores y normas que se transmiten a través de la cultura son fundamentales para el desarrollo personal y social. La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible. Los sistemas de creencias, valores y normas que se transmiten a través de la cultura son fundamentales para el desarrollo personal y social. La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible. Los sistemas de creencias, valores y normas que se transmiten a través de la cultura son fundamentales para el desarrollo personal y social. La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible. Los sistemas de creencias, valores y normas que se transmiten a través de la cultura son fundamentales para el desarrollo personal y social. La cultura es un factor clave en la promoción del desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

### **1. 3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone adalah merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 dan untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Dalam mencapai maksud diatas, tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra
- b. Mengidentifikasi kinerja pelayanan BPKAD.
- c. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis BPKAD 1 (satu) tahun mendatang.
- d. Menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan target pembangunan BPKAD selama 1 (satu) tahun mendatang.
- e. Menetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang disertai pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun mendatang.
- f. Menetapkan rencana kerja dan pendanaan BPKAD selama 1 (satu) tahun mendatang.

### **1. 4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan mengemukakan capaian-capaiyan pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra priode sebelumnya

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan hasil penelaah kebijakan nasional dan rumusan peryataan tujuan dan sasaran beserta indikatornya, serta perumusan program dan kegiatan

the most important finding of the field study is that significant research has been done in this area (1997), and that additional research is required to further develop the program. This study identified multiple conflicts in the field, which seems to indicate that the field situation is very complex and requires more research.

student loan repayment, that could potentially reduce the burden of debt.

Additional information about the changes can be found at [www.legis.state.vt.us](#).

electrolyte balance, and glucose metabolism, and is used as a

W. H. G. M. van der Veen | [View profile](#)

W. H. GOLDBECK, JR., C. L. COOPER, AND R. E. KELLY, Department of Chemical Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48106

Journal of Special Education 37(3) 200-215 © 2004 by the author(s). 0022-4833/04/3703-0200\$15.00  
http://www.jse.sagepub.com

g. *Leopoldina* (Braunschweig) *Monographia*, 1874-1875.

“我真想跟你说声对不起，但你已经走了，我再怎么道歉也没有用。”

通过以上对“新民主主义”与“社会主义”的讨论，我们对“新民主主义”有了一个初步的了解。

ANSWERED BY THE MUSEUM

1920-1921, 1921-1922, 1922-1923.

19. The following table presents the results of the regression analysis of the relationship between the independent variables and the dependent variable.

6. *U.S. Fish Commission, Report for 1881*, p. 171.

ANSWER

ESTATE PLANNING

• The following table summarizes the results of the study. The first column lists the variables, the second column provides the estimated coefficients, and the third column indicates the standard errors.

卷之三

Figure 1. The relationship between the number of species and the area of forest.

the author had intended to do, according to his original plan, was to have been the following:

#### REFERENCES AND NOTES

19. The following table summarizes the results of the study. The first column lists the variables, the second column lists the descriptive statistics, and the third column lists the regression coefficients and their standard errors.

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan hasil perumusan program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

#### **BAB V. PENUTUP**

HANNAH D. WILSON, JR., A NATURALIZED CITIZEN OF THE UNITED STATES, AND ALICE M. WILSON,  
WIFE OF HANNAH D. WILSON, JR., A NATURALIZED CITIZEN OF THE UNITED STATES,

Plaintiffs, v.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Kabupaten Bone dalam menyusun program kegiatan BPKAD Kabupaten Bone, selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan

and independent, and the self-help group movement can be seen as a response to the lack of support available from the state and the market. The movement has been able to develop its own form of social capital, based on trust and mutual support, which is often absent in other parts of society. This has allowed it to survive despite the challenges it faces, such as the lack of resources and the stigma associated with being part of a self-help group. The movement has also been able to adapt to changing circumstances, such as the shift from agriculture to industry, and the increasing urbanization of society. The movement has been successful in its efforts to improve the lives of its members, and has become a source of hope and inspiration for many people in India.

<sup>14</sup> See also the discussion of the relationship between the two concepts in the section on "The Concept of Space-Time" below.

pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kunci BPKAD Kabupaten Bone yang merupakan representasi dari Misi ke 1 (satu) “**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).**” dengan program strategis pemerintah daerah yaitu: *Program Penigkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yaitu:

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 2.1.

qualitative approach to the study of government, subject to two qualifications: (a) the original material must be used, and (b) the analysis must be limited to a single period of time. In consequence, the method emphasizes causation and causal effects. This is a limitation in that such analysis cannot encompass long-term trends, or shifts in the system over extended periods of time. It also limits the ability to predict future events based on past experience.

Second, the causal approach is not well suited to the study of policy making, because it tends to emphasize the role of individual actors rather than the collective action of groups.

Third,

Fourth,

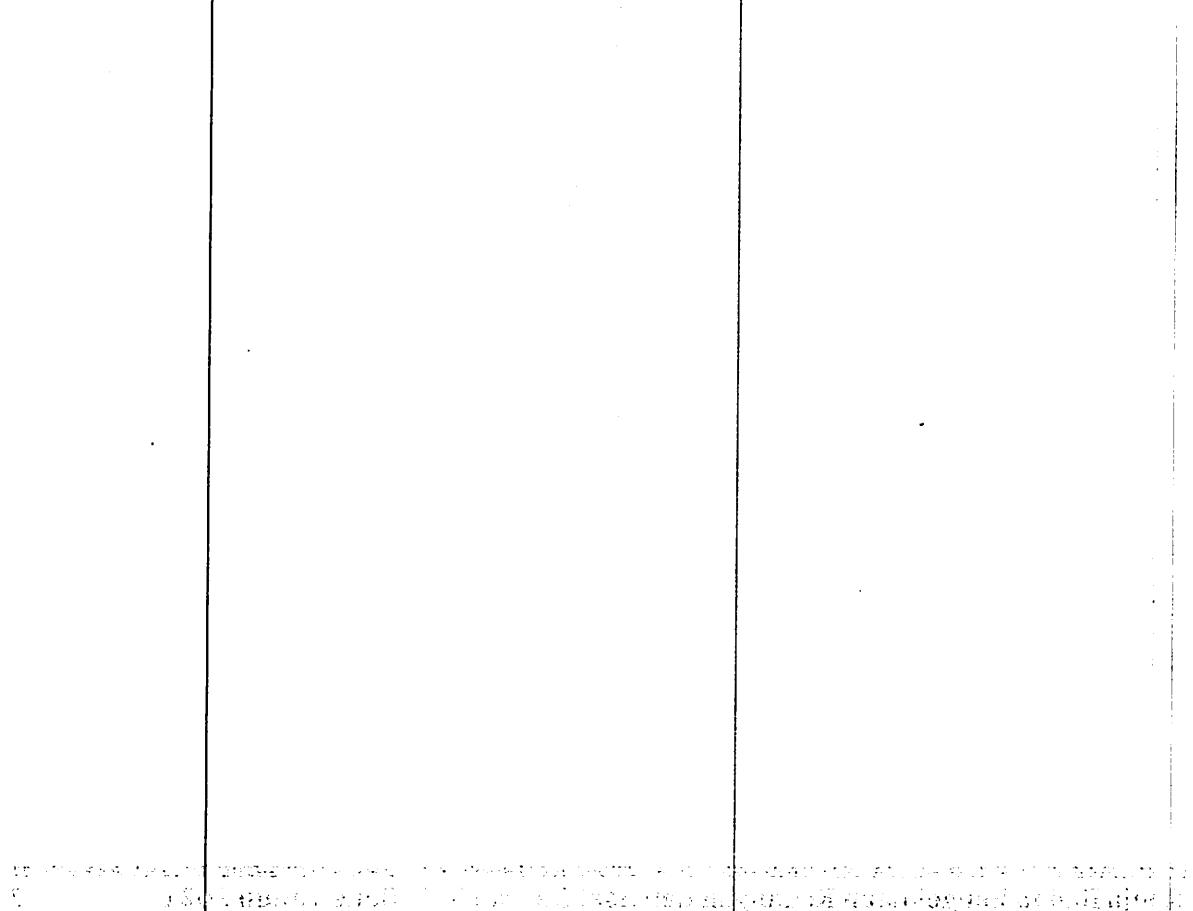


Fig. 1. Causal Approach: A Diagrammatic Summary of the Causal Approach to the Study of Government

**Tabel. 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun s/d Tahun 2020**

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ket.		
					5		6		7		8 = 6+7				
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10	11
		<i>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepergawaiuan dan Persandian</i>													
		<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>													
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,650	147,203,254,283	1,579	26,404,969,950	1,491	25,939,819,113	3,021	51,418,424,863	39.5	34.9	BPKAD	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang di bayar	1,805	127,720,018,500	361	22,756,961,450	360	22,717,961,803	721	44,776,806,968	39.9	35.1	Belanja jasa Kantor Telpon Air dan Listrik	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang menerima tunjangan	545	4,118,201,298	58	517,444,800	54	489,820,499	163	833,079,184	29.9	20.2	Belanja jasa kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Jasa Programmer	
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	260	1,365,893,503	52	500,000,000	50	485,240,000	102	795,240,000	39.2	58.2	Belanja Surat kabar majalah	
		Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah SPPD	5,000	3,642,828,112	1,100	737,000,000	1,020	680,039,411	2,020	1,500,238,411	40.4	41.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah	



NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9 = Q/5 x 100%	10	11				
				K	Rp.	K	Rp	K						
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran	40	10,356,312,870	8	1,893,563,700	7	1,566,757,400	15	3,513,060,300	37.5	33.9	ATK Prangko, Materai cetak dan penggandaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Perasarana Aparatur yang kondisi baik	675	4,825,905,719	149	1,587,272,600	134	1,412,364,902	269	3,134,841,002	39.8 5	64.96	BPKAD
		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor	25	64,575,000	3	34,500,000	3	34,500,000	8	60,250,000	32.0	93.3	Pengadaan AC
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	190	849,060,800	31	376,800,000	30	367,478,500	68	827,099,500	35.8	97.4	Mesin absensi Komputer printer komputer note book
		Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Jumlah kebutuhan mebeleur	35	405,825,000	36	176,800,000	35	176,700,000	42	221,700,000	120.0	54.6	Meja Kerja Almari Kursi Tunggu
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	25	588,268,840	4	478,650,600	3	406,068,570	8	828,568,570	32.0	140.8	Alat listrik dan Elektronik belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih pemeliharaan Ruangan
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Mobil dan Motor yang dipelihara	200	1,767,562,800	35	315,000,000	26	238,452,832	66	815,207,932	33.0	46.1	Belanja Bahan Bakar minyak, Penggantian suku cadang, belanja Jasa Servis kendaraan
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	200	1,150,613,279	40	205,522,000	37	189,165,000	77	382,015,000	38.5	33.2	Belanja Jasa Service Peralatan kantor dan Elektronik

1968. JOURNAL OF CLIMATE AND APPLIED METEOROLOGY, VOL. 7, NO. 10, PAGES 1021-1030

THE INFLUENCE OF THE EQUATORIAL TROPICAL CYCLONE ON THE WIND FIELD AND PRECIPITATION OVER THE TROPICAL OCEAN

YUAN YUAN CHEN<sup>1</sup>, YI HUA ZHENG<sup>1</sup>, YUAN YUAN CHEN<sup>2</sup>, AND YI HUA ZHENG<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institute of Geophysics and Seismology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

<sup>2</sup> Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

(Manuscript received 10 January 1997, in final form 10 April 1998)

**ABSTRACT.** This study uses the NCEP–DOE reanalysis data to examine the influence of the equatorial tropical cyclone (ETC) on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The results show that the ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

The ETC has a strong influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean. The ETC has a significant influence on the wind field and precipitation over the tropical ocean.

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9 = Q/5 x 100%	10	11					
				K	Rp.	K	Rp.	K							
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60	214,200,000	12	117,500,000	9	92,675,000	21	112,675,000	35.0	52.6	BPKAD	
		Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	60	214,200,000.00	12	117,500,000	9	92,675,000	21	112,675,000	35.0	52.6		Bimtek Aplikas, Bimtek SKP online
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu	100	557,939,750	7	300,945,550	80	271,052,100	100	499,260,400	100.0	89.5	BPKAD	
		Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	25	517,386,633	7	107,190,350	5	100,720,600	10	190,465,950	40.0	36.8		Belanja ATK, Jasa Upah operator SIPPD, SIRUP, SIAKUDA,SIPBHP/SIMBMD, Belanja Penggandaan dan Makan Minum
		Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	Jumlah SKPD yang Verifikasi	15	557,939,750	66	104,553,000	66	102,782,400	69	201,283,300	460.0	36.1		Belanja ATK, Jasa Tenaga Peneliti, Penggandaan, Makan minum,Perjanjian Dinas.
		Kegiatan Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan SISMONTEPRA dan Laporan SPIP	60	709,489,400	24	89,202,200	9	67,549,100	21	107,511,150	35.0	15.2		Honor Tim Pelaksana, ATK, Jasa Upah, Penggandaan, Makan minum.
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (dua)Hari terhadap SP2D yang Terbit	37,250	1,620,257,621	7,500	278,337,500	6,500	242,018,250	13,950	515,998,000	37.45	31.85	BPKAD	

the first time, and the author's name is given in the title. The author's name is also given in the title of the second paper.

The author's name is given in the title of the third paper. The author's name is also given in the title of the fourth paper.

The author's name is given in the title of the fifth paper. The author's name is also given in the title of the sixth paper.

The author's name is given in the title of the seventh paper. The author's name is also given in the title of the eighth paper.

The author's name is given in the title of the ninth paper. The author's name is also given in the title of the tenth paper.

The author's name is given in the title of the eleventh paper. The author's name is also given in the title of the twelfth paper.

The author's name is given in the title of the thirteenth paper. The author's name is also given in the title of the fourteenth paper.

The author's name is given in the title of the fifteenth paper. The author's name is also given in the title of the sixteenth paper.

The author's name is given in the title of the seventeenth paper. The author's name is also given in the title of the eighteenth paper.

The author's name is given in the title of the nineteenth paper. The author's name is also given in the title of the twentieth paper.

The author's name is given in the title of the twenty-first paper. The author's name is also given in the title of the twenty-second paper.

The author's name is given in the title of the twenty-third paper. The author's name is also given in the title of the twenty-fourth paper.

The author's name is given in the title of the twenty-fifth paper. The author's name is also given in the title of the twenty-sixth paper.

The author's name is given in the title of the twenty-seventh paper. The author's name is also given in the title of the twenty-eighth paper.

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9 = Q/5 x 100%	10	11				
				K	Rp.	K	Rp.	K						
		Kegiatan Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Dana Kas Daerah oleh BUD	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	37,250	1,620,257,621	7,500	278,337,500	6,500	242,018,250	13,950	515,998,000	37.4	31.8	Belanja ATK, Prangko, Jasa Kantor, Cetak Penggandaan, makan minum, Perjalanan Dinas
		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	130	364,282,811	6	52,088,500	21	42,211,700	47	96,996,700	36.2	BPKAD	
		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	364,282,811	6	37,778,500	4	32,211,700	10	72,686,700	33.3	20.0	Belanja ATK , Cetak Penggandaan, makan Minum, ( Dokumen RKA,DPA)
		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Informasi yang Diupload	100	130,101,004	25	14,310,000	17	10,000,000	37	24,310,000	37.0	18.7	Regulasi 6 Laporan 5 Profil 4 Pengumuman 4 Sakip 2 Kontak 1
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,250	29,749,204,434	18,385	5,501,385,900	17,696	4,969,480,254	36,146	10,041,365,354	39.2	33.8	BPKAD
		Penyusunan analisis standar Belanja	Jumlah Dokumen Standar Belanja	6	517,550,000	1	160,094,050	1	132,152,250	1	132,152,250	16.7	25.5	Belanja ATK, Cetak Penggandaan, Makan minum, Perjalanan dinas Luar daerah
		Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang	10	651,038,434	2	142,227,500	2	134,555,000	4	242,731,400	40.0	37.3	Belanja Barang Pakai habis, Cetak Penggandaan, Makan Minum, Pjalan Dinas,



NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9 = Q/5 x 100%	10	11				
				K	Rp.	K	Rp	K						
		Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Dokumen Ranperda APBD	10	1,730,733,656	2	464,069,550	2	451,777,850	4	Belanja Pakai Habis, Jasa Kantor, cetak Penggandaan Makan Minum, Perjalanan Dinas			
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD	10	1,492,815,869	2	299,569,250	2	279,173,620	4	Belanja Pakai Habis, Cetak Penggandaan, makan Minum,			
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan	5	1,083,741,363	2	173,099,550	2	172,637,850	3	318,937,850	60.0	29.4	-
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen per KDH tentang Penjabaran Perubahan	5	1,034,368,032	1	208,050,300	1	195,213,750	-	-	-	-	-
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjawaban	5	1,199,895,540	1	278,756,200	1	272,488,600	-	484,873,150	-	40.4	Belanja Pakai Habis, Penggandaan, Makan Minum, Pejalanan Dinas
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban	5	909,749,485	1	214,450,000	1	205,665,080	2	373,961,080	40.0	41.1	Belanja Pakai Habis, , Belna Cetak Penggandaan, Belanja Makan Minum ,
		Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersedianya sistem informasi keuangan daerah	5	1,221,044,759	1	235,165,000	1	233,448,800	2	482,928,800	40.0	39.6	Belanja ATK, Penggandan, Makan Minum, Perjalanan Dinas

Category	Sub-Categories	Description	Notes
1. General Information	1.1 Basic Data	1.1.1 Name of Project	Project Alpha
	1.1.2 Project ID	PRJ-A-001	
	1.1.3 Location	New York City, USA	
	1.1.4 Date Initiated	2023-01-01	
	1.1.5 Lead Manager	John Doe	
	1.1.6 Budget (USD)	100,000	
	1.2 Project Scope	1.2.1 Scope Item A	Defined scope item A
		1.2.2 Scope Item B	Defined scope item B
	1.3 Stakeholders	1.3.1 Stakeholder A	Key stakeholder A
		1.3.2 Stakeholder B	Key stakeholder B
	1.4 Risk Assessment	1.4.1 Risk A	High priority risk
		1.4.2 Risk B	Medium priority risk
	1.5 Resource Allocation	1.5.1 Resource Type A	Allocated resource A
		1.5.2 Resource Type B	Allocated resource B
	1.6 Timeline	1.6.1 Phase A	Initial phase A
		1.6.2 Phase B	Initial phase B
	1.7 Performance Metrics	1.7.1 Metric A	Initial value A
		1.7.2 Metric B	Initial value B
2. Detailed Project Phases	2.1 Phase A: Planning	2.1.1 Sub-Phase A.1	Planning sub-phase A.1
		2.1.2 Sub-Phase A.2	Planning sub-phase A.2
	2.2 Phase B: Execution	2.2.1 Sub-Phase B.1	Execution sub-phase B.1
		2.2.2 Sub-Phase B.2	Execution sub-phase B.2
	2.3 Phase C: Monitoring	2.3.1 Sub-Phase C.1	Monitoring sub-phase C.1
		2.3.2 Sub-Phase C.2	Monitoring sub-phase C.2
3. Specific Initiatives	3.1 Initiative A	3.1.1 Sub-Initiative A.1	Initiative A sub-initiative A.1
		3.1.2 Sub-Initiative A.2	Initiative A sub-initiative A.2
	3.2 Initiative B	3.2.1 Sub-Initiative B.1	Initiative B sub-initiative B.1
		3.2.2 Sub-Initiative B.2	Initiative B sub-initiative B.2
4. Financial Overview	4.1 Budget Allocation	4.1.1 Allocation A	Budget allocation A
		4.1.2 Allocation B	Budget allocation B
	4.2 Actual Expenditure	4.2.1 Expenditure A	Actual expenditure A
		4.2.2 Expenditure B	Actual expenditure B
5. Risk Register	5.1 Risk A	Severity: High	Impact: Critical
	5.2 Risk B	Severity: Medium	Impact: Major
6. Resource Log	6.1 Resource A	Type: Software	Allocation: 100%
	6.2 Resource B	Type: Hardware	Allocation: 50%
7. Timeline Progress	7.1 Milestone A	Completed	On schedule
	7.2 Milestone B	Pending	At risk
8. Performance Metrics	8.1 Metric A	Value: 100	Target: 100
	8.2 Metric B	Value: 80	Target: 90

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9 = Q/5 x 100%	10	11	
				K	Rp.	K	Rp.	K			
		Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi	40	1,760,639,974	1	273,726,300	6	189,250,000	14	Belanja ATK, Cetak Penggandaan, Makan Minum,
		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	15	1,490,340,827	9	235,581,500	3	218,272,441	-	Belanja ATK, Cetak Penggandaan, Makan Minum,
		Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksnaan APBD	Jumlah DPA dan DPPA SKPD	660	1,426,354,551	3	328,205,800	132	327,645,363	264	Belanja ATK, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum, Perjalanan Dinas ( Dokumen DPA - DPPA SKPD)
		Pengamanan Aset Daerah	Daftar aset yang dimiliki	330	861,968,590	66	188,134,500	55	157,396,050	121	Belanja ATK, cetak penggandaan, Perjalanan Dinas
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen PPAS dan NOTA Keuangan APBD	10	578,025,751	66	77,117,600	2	76,839,250	4	Belanja Pakai habis, Cetak Penggandaan, Makan Minum, Perjalanan Dinas
		Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Terlaksananya Monev aplikasi SIMDA	5	496,621,552	2	128,712,200	1	123,193,000	-	
		Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset	10	654,231,113	1	69,340,950	2	61,648,500	4	Belanja Habis Pakai, Belanja Cetak Penggandaan, Makan Minum



NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9 = Q/5 x 100%	10	11				
				K	Rp.	K	Rp	K						
		Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/jasa	Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang /jasa	10	371,802,649	2	45,191,000	2	32,047,500	4	95,492,500	40.0	25.7	Belanja Pakai Habis
		Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Faktur Pajak	4,100	528,588,670	820	122,560,750	820	122,560,750	1,640	245,121,500	40.0	46.4	Belanja Cetak, Belanja Pakai Habis, Makan Minum
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dinilai	330	613,499,090	66	172,088,800	50	98,100,900	116	215,989,900	35.2	35.2	Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Peningkatan Pengelolaan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dibina dalam penggunaan aplikasi penganggaran	330	2,109,665,840	66	155,920,000	66	149,739,000	132	357,564,000	40.0	16.9	Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Pengelolaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	60	269,569,280	12	21,601,750	6	15,903,000	18	36,453,000	30.0	13.5	Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Jumlah SPM yang terbit	35,000	1,443,994,946	7,000	280,072,550	6,500	266,480,000	13,500	565,552,450	38.6	39.2	Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Peningkatan Pelaporan Administrasi keuangan Daerah	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	60	1,399,886,803	12	235,395,500	10	209,202,050	22	490,902,050	36.7	35.1	Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan, ( SK.PA, SK Bendahara, Pajak Rokok, Kesehatan Gratis,
		Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	330	1,930,875,837	66	349,233,600	66	325,687,300	132	711,721,300	40.0	36.9	Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,

Section	Topic	Content
1	Introduction	• Definition of a matrix • Basic operations: addition, subtraction, multiplication • Properties of matrix operations
2	Matrix Inverses	• Definition of an inverse matrix • Existence and uniqueness of inverses • Methods for finding inverses: row reduction, adjugate formula
3	Determinants	• Definition of a determinant • Properties of determinants • Cofactor expansion • Applications: area of a triangle, volume of a parallelepiped
4	Vector Spaces	• Definition of a vector space • Subspaces • Linear independence • Basis and dimension • Change of basis
5	Linear Transformations	• Definition of a linear transformation • Matrix representation of linear transformations • Kernel and range • Isomorphisms
6	Eigenvalues and Eigenvectors	• Definition of eigenvalues and eigenvectors • Diagonalization • Applications: systems of differential equations, Markov chains
7	Orthogonality	• Definition of orthogonality • Orthogonal matrices • Gram-Schmidt process • Least squares approximation
8	Complex Matrices	• Definition of complex matrices • Hermitian and unitary matrices • Spectral theorem for Hermitian matrices
9	Applications	• Various applications of linear algebra in science and engineering

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluesi (2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9 = Q/5 x 100%	10	11				
				K	Rp.	K	Rp	K						
		Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD	3,960	1,023,348,477	792	173,801,000	652	145,397,100	1,444	334,097,900	36.5	32.6	Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan, Perjalanan Dinas
		Pelaporan Aset	Jumlah laporan aset Daerah	10	693,381,107	2	76,871,000	2	67,010,750		200,680,500	40.0	28.9	Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan	75	1,138,147,001	15	147,194,700	8	72,229,300	4	223,353,000	30.7	19.6	Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Pengelolaan Gaji	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	46,860	1,634,875,236	9,372	245,155,000	9,300	233,765,200	23	502,940,200	0.0	30.8	Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan, Perjalanan Dinas
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Percentase tidak lanjut temuan atas kerugian negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR	50	949,737,329	12	152,500,000	10	135,751,794	20	213,251,794	40.0	22.5	BPKAD
		Peningkatan Pelaksanaan TGR	Jumlah Kasus TGR	50	949,737,329	12	152,500,000	10	135,751,794	20	213,251,794	40.0	22.5	Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan, Perjalanan Dinas

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100
101	102	103	104	105
106	107	108	109	110
111	112	113	114	115
116	117	118	119	120
121	122	123	124	125
126	127	128	129	130
131	132	133	134	135
136	137	138	139	140
141	142	143	144	145
146	147	148	149	150
151	152	153	154	155
156	157	158	159	160
161	162	163	164	165
166	167	168	169	170
171	172	173	174	175
176	177	178	179	180
181	182	183	184	185
186	187	188	189	190
191	192	193	194	195
196	197	198	199	200
201	202	203	204	205
206	207	208	209	210
211	212	213	214	215
216	217	218	219	220
221	222	223	224	225
226	227	228	229	230
231	232	233	234	235
236	237	238	239	240
241	242	243	244	245
246	247	248	249	250
251	252	253	254	255
256	257	258	259	260
261	262	263	264	265
266	267	268	269	270
271	272	273	274	275
276	277	278	279	280
281	282	283	284	285
286	287	288	289	290
291	292	293	294	295
296	297	298	299	300
301	302	303	304	305
306	307	308	309	310
311	312	313	314	315
316	317	318	319	320
321	322	323	324	325
326	327	328	329	330
331	332	333	334	335
336	337	338	339	340
341	342	343	344	345
346	347	348	349	350
351	352	353	354	355
356	357	358	359	360
361	362	363	364	365
366	367	368	369	370
371	372	373	374	375
376	377	378	379	380
381	382	383	384	385
386	387	388	389	390
391	392	393	394	395
396	397	398	399	400
401	402	403	404	405
406	407	408	409	410
411	412	413	414	415
416	417	418	419	420
421	422	423	424	425
426	427	428	429	430
431	432	433	434	435
436	437	438	439	440
441	442	443	444	445
446	447	448	449	450
451	452	453	454	455
456	457	458	459	460
461	462	463	464	465
466	467	468	469	470
471	472	473	474	475
476	477	478	479	480
481	482	483	484	485
486	487	488	489	490
491	492	493	494	495
496	497	498	499	500
501	502	503	504	505
506	507	508	509	510
511	512	513	514	515
516	517	518	519	520
521	522	523	524	525
526	527	528	529	530
531	532	533	534	535
536	537	538	539	540
541	542	543	544	545
546	547	548	549	550
551	552	553	554	555
556	557	558	559	560
561	562	563	564	565
566	567	568	569	570
571	572	573	574	575
576	577	578	579	580
581	582	583	584	585
586	587	588	589	590
591	592	593	594	595
596	597	598	599	600
601	602	603	604	605
606	607	608	609	610
611	612	613	614	615
616	617	618	619	620
621	622	623	624	625
626	627	628	629	630
631	632	633	634	635
636	637	638	639	640
641	642	643	644	645
646	647	648	649	650
651	652	653	654	655
656	657	658	659	660
661	662	663	664	665
666	667	668	669	670
671	672	673	674	675
676	677	678	679	680
681	682	683	684	685
686	687	688	689	690
691	692	693	694	695
696	697	698	699	700
701	702	703	704	705
706	707	708	709	710
711	712	713	714	715
716	717	718	719	720
721	722	723	724	725
726	727	728	729	730
731	732	733	734	735
736	737	738	739	740
741	742	743	744	745
746	747	748	749	750
751	752	753	754	755
756	757	758	759	760
761	762	763	764	765
766	767	768	769	770
771	772	773	774	775
776	777	778	779	780
781	782	783	784	785
786	787	788	789	790
791	792	793	794	795
796	797	798	799	800
801	802	803	804	805
806	807	808	809	810
811	812	813	814	815
816	817	818	819	820
821	822	823	824	825
826	827	828	829	830
831	832	833	834	835
836	837	838	839	840
841	842	843	844	845
846	847	848	849	850
851	852	853	854	855
856	857	858	859	860
861	862	863	864	865
866	867	868	869	870
871	872	873	874	875
876	877	878	879	880
881	882	883	884	885
886	887	888	889	890
891	892	893	894	895
896	897	898	899	900
901	902	903	904	905
906	907	908	909	910
911	912	913	914	915
916	917	918	919	920
921	922	923	924	925
926	927	928	929	930
931	932	933	934	935
936	937	938	939	940
941	942	943	944	945
946	947	948	949	950
951	952	953	954	955
956	957	958	959	960
961	962	963	964	965
966	967	968	969	970
971	972	973	974	975
976	977	978	979	980
981	982	983	984	985
986	987	988	989	990
991	992	993	994	995
996	997	998	999	1000

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD**

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Bone, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,

### **2.2.1. Strength (kekuatan)**

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bone dan melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone serta Raperda KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bone;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
3. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

### **2.2.2. Weakness (kelemahan)**

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja;
3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### **2.2.3. Opportunity (peluang)**

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran

The program of research topics will be organized around two main areas: the development of new methods for the analysis of complex systems and the application of these methods to specific problems in science and engineering. The first area will focus on the development of new methods for the analysis of complex systems, including the development of new statistical methods for the analysis of large datasets, the development of new methods for the analysis of network data, and the development of new methods for the analysis of time series data. The second area will focus on the application of these methods to specific problems in science and engineering, including the analysis of biological systems, the analysis of social networks, the analysis of financial markets, and the analysis of physical systems.

the author's name and address, and the date of publication.

6. *Calystegia soldanella* L. - Common Bindweed

the results of the study, it is recommended that the following recommendations be adopted:

在這段時間內，我會繼續研究和發展我的技術，並嘗試將它應用於更多的領域。

and the required relationship between the management and culture has been adopted. The new model can be used to measure the effectiveness of existing management systems.

Sample	Depth (m)	Bottom water	Surface water
1	0-10	1000	1000
2	10-20	1000	1000

W. G. BROWN AND J. W. H. COOPER / THE INFLUENCE OF THE CROWN ON THE STABILITY OF VAPOR-  
LIQUID EQUILIBRIA IN AQUEOUS POLY(ACRYLIC ACID) SYSTEMS

As part of the project, the following areas of the system will be evaluated under this study: organizational structure, management, and

“I am not a member of any party,” he said. “I am a member of the people.”

berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/ dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bone serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kabupaten Bone disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi ;
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Kabupaten Bone dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### 2.2.4. Treath (tantangan),

1. Terbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.
2. Masih banyak OPD yang menyajikan Laporan Keuangan dan Aset tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual

and get back on track. I am going to continue to research what caused my wife's breast cancer and see if there are any other things we can do to help her. I am writing this article to let you all know what I have learned so far.

I am not a doctor or a scientist, but I am a cancer survivor. I have been through a lot of different treatments and I have learned a lot from them. I have also read many books and articles on cancer and I have found some very useful information. One of the most important things I have learned is that prevention is key. I have learned that it is better to prevent cancer than to treat it. I have also learned that it is important to stay healthy and to avoid things that can cause cancer. I have learned that it is important to eat a healthy diet, exercise regularly, and avoid smoking and drinking alcohol. I have also learned that it is important to get regular check-ups and to see a doctor if you have any concerns about your health. I have learned that it is important to stay positive and to have hope. I have learned that it is important to support each other and to be there for each other. I have learned that it is important to remember that you are not alone and that there is always hope.

I have learned that prevention is key. I have learned that it is better to prevent cancer than to treat it. I have learned that it is important to stay healthy and to avoid things that can cause cancer. I have learned that it is important to eat a healthy diet, exercise regularly, and avoid smoking and drinking alcohol. I have learned that it is important to get regular check-ups and to see a doctor if you have any concerns about your health. I have learned that it is important to stay positive and to have hope. I have learned that it is important to support each other and to be there for each other. I have learned that it is important to remember that you are not alone and that there is always hope.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Bone Tahun 2020**

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			97%	98%	99%	100%	97%	100%	99%	100%	
	Jumlah Rekening yang di Bayar			294 Rekening Listrik								
				20 Rekening Air								
				47 Rekening Telpon/Speede								
	Jumlah ASN yang menerima tunjangan			109 ASN	107 ASN	107 ASN	107 ASN	109 ASN	107 ASN	107 ASN	107 ASN	
	Jumlah Media yang Menyediakan Bahan Bacaan			52 Media								
	Jumlah SPPD			1000 SPPD	1100 SPPD	1100 SPPD	1150 SPPD	1000 SPPD	1150 SPPD	1100 SPPD	1150 SPPD	
	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran			8 Paket								
2	<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur</b>			98%	99%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	
	Jumlah Bangunan Gedung Kantor			1 Gedung				1 Gedung				

Geological and environmental history of the early stages of lithification

<sup>1</sup> The author would like to thank the editor and anonymous reviewers for their useful comments and suggestions.

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas			3 Unit Motor	2 Unit Motor	1 Unit Mobil		3 Unit Motor		1 Unit Mobil			
	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas			2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit			
	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor			AC 3 Unit	1 Unit			5 Unit	AC 3 Unit	5 Unit		5 Unit	
	Jumlah Peralatan Rumah Jabtan Dinas			2 Unit				2 Unit					
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor			Komputer/Pc /Lectop 13 Unit	Komputer/Pc 10 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc /Lectop 13 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc 5 Unit		
				Mesin Ketik 1 Unit	Mesin Ketik 1 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit	Mesin Ketik 1 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit	
				Mesin Absensi 1 Uni	Mesin Absensi 1 Uni	UPS 3 Unit	UPS 3 Unit	Mesin Absensi 1 Uni	UPS 3 Unit	UPS 3 Unit	UPS 3 Unit	UPS 3 Unit	
				Printer 5 Unit				Printer 5 Unit					
				UPS 3 Unit				UPS 3 Unit					
				Kulkas 2 Unit				Kulkas 2 Unit					
				Kamera 1 Unit				Kamera 1 Unit					
				Proyektor 1 Unit				Proyektor 1 Unit					
				GPS Pengukur Tanah 1 Unit				GPS Pengukur Tanah 1 Unit					
				7 Unit	Almari 25 Unit	2 Unit	2 Unit	7 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
				1 Paket				1 Paket					
				4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	
				Mobil 7 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 7 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	

卷之三

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	yang di Pelihara			33 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	33 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	
	Jumlah Peralatan yang di Pelihara Gedung Kantor			40 Unit	40 Unit	40 Unit	45 Unit	40 Unit	45 Unit	40 Unit	45 Unit	45 Unit	
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur			95%	97%	99%	100%	95%	100%	99%	100%		
4	Jumlah pakaian seragam			110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	
	Meningkatnya ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim			1 ASN	2 ASN			1 ASN					
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek			12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	
	Jumlah Peserta StudiBanding			50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	
	Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak			75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	
	Meningkatnya Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu			93%	95%	97%	99%	93%	99%	97%	99%		
	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD			5 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Laporan Realisasi Semester			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	



NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	Jumlah Desa RTS			20 Desa				20 Desa					
	Jumlah SKPD yang melakukan Verifikasi SPJ			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Laporan SISMON Tepra Bebasis Online SKPD dan SPIP			24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Acuan Pelaksanaan Program Kegiatan			93%	96%	99%	100%	93%	100%	99%	100%		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Informasi yang diupload			20 Berita	25 berita	25 berita	25 berita	20 Berita	25 berita	25 berita	25 berita	25 berita	
	Jumlah Pelaksanaan Pameran			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
7	Presentase SP2D yang diterbitkan Kurang 2 (dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit			98%	99%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah SP2D yang diterbitkan			7450 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7450 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	
8	Penetapan APBD dan APBD P sesuai Ketentuan			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
9	Presentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrual			90.13%	93.74%	97.49%	100%	90.13%	100%	97.49%	100%		



NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Presentase Penyaluran Belanja Daerah			98%	98%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	
11	Presentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah Secara Benar			77.27%	81.82%	86.36%	90.91%	77.27%	90.91%	86.36%	90.91%	
12	Presentase Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Standar Satuan Harga Barang/ RKBMD yang disusun dan ditetapkan Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Presentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan			29.69%	29.78%	29.86%	29.94%	29.69%	29.94%	29.86%	29.94%	
	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran perubahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjawaban			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Jumlah Dokumen perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah			1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi			8 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	8 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	
	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
	Jumlah DPA dan DPPA SKPD			132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	
	Daftar Aset yang dimiliki			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Dokumen Rancangan PPAS APBD dan Rancangan Nota Keuangan APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Terlaksananya Monev aplikasi SIMDA			1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	
	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Asset			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Barang/Jasa			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
Jumlah Peserta Bimtek/Angkatan	70 ASN			70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	



NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Jumlah Faktur Pajak			820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	
	Jumlah SKPD yang diNilai			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah SKPD yang dibina dalam penggunaan aplikasi penganggaran			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan			12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	
	Jumlah SPM yang diterbitkan			7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	
	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaa APBD			792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	
	Jumlah Laporan Aset			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	Jumlah PNS yang Menerima Gaji			9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	
	Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan			15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	
	Jumlah Perda dan Perkada					2 Perda				2 Perda		
	Presentae Pengembalian atas Kerugian Negara			96%	97%	98%	99%	96%	99%	98%	99%	
	Jumlah Kasus TGR			10 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	10 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	

Category	Item	Current		Projected		Notes
		Value	Count	Value	Count	
Assets	Bank Accounts	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Assets	Cash	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Assets	Inventory	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Assets	Land	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Assets	Office Equipment	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Assets	Prepaid Expenses	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Assets	Property	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Assets	Receivables	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Assets	Software	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Assets	Total Assets	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Liabilities	Bank Accounts	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Liabilities	Cash	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Liabilities	Inventory	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Liabilities	Land	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Liabilities	Office Equipment	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Liabilities	Prepaid Expenses	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Liabilities	Property	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Liabilities	Receivables	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Liabilities	Software	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Liabilities	Total Liabilities	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Equity	Common Stock	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Equity	Retained Earnings	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Equity	Total Equity	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Total Assets		\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Total Liabilities		\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	
Total Equity		\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	

Estimated financial information is provided for informational purposes only and is not intended to be relied upon for any specific purpose. Actual financial results may differ significantly from those projected.

## **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone**

Isu-isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, dan berbasis bermutu
2. Belum tertatanya manajemen aset daerah
3. Belum sepenuhnya laporan keuangan dan aset sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)
4. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Tagihan penjualan angsuran atas ruko, toko, kios dan lods Pasar Sentral Palakka Watampone belum didukung dengan bukti perikatan, dan pembelian yang telah lunas belum diproses bukti kepemilikannya
2. Sekitar 70% aset pemda belum tersertifikat dan ada beberapa yang belum teridentifikasi serta beberapa aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak
3. Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan tentang pengelolaan keuangan
4. Penatausahaan keuangan pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang belum tertib sepenuhnya
5. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak tertib
6. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan peraturan perundang-undangan dan teknologi informasi.

Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut:

and the first stage of the process is to identify the relevant documents. This can be done by examining the files and records of the organization, as well as by consulting with relevant staff members and external sources. Once the relevant documents have been identified, they should be reviewed and analyzed to determine their relevance and importance. This may involve reading through the documents, summarizing key points, and identifying any potential risks or issues. The next step is to develop a plan for addressing the identified risks. This may involve creating a timeline for addressing each risk, assigning responsibilities to specific individuals, and establishing a system for monitoring progress and tracking outcomes. Finally, the plan should be communicated to all relevant stakeholders, including management, employees, and customers, to ensure that everyone is aware of the risks and the steps being taken to address them. It is important to remember that risk management is an ongoing process, and it should be reviewed and updated regularly to reflect changes in the organization's environment and operations.

1. Terbentuknya pengelolaan keuangan daerah yang semakin mantap berlandaskan pada aturan pengelolaan keuangan yang jelas dan mudah dipahami dan dilaksanakan;
2. Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin terdesentralisasi pada satuan kerja yang terkecil/desa serta berbasis pada capaian kinerja;
3. Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM yang memadai dan mempunyai kapasitas sesuai dengan harapan;
4. Terciptanya kebijakan-kebijakan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Peningkatan Koordinasi antar OPD dalam rangka menciptakan kebersamaan dalam pencapaian satu tujuan, satu pikiran guna peningkatan pembangunan daerah;
6. Terlaksananya sosialisasi, bintek dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksana teknis kegiatan;
7. Terciptanya *Reward* dan *Punishment* yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan terkait APBD Daerah;
8. Penyusunan Kebijakan akuntansi sesuai dengan Juknis Permendagri dan Permenkeu serta Pelaksanaan Sosialisasi terkait PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada pelaksana teknis kegiatan;
9. Pengelolaan dan Inventarisasi aset yang tertib dan berbasis Teknologi Informasi serta Peningkatan kualitas SDM khususnya pengurus barang;
10. Inventarisasi aset tetap secara cepat, tepat dan akurat;
11. Penertiban dan persertifikatan Aset Daerah.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:



**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	99%	27,717,603,200	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	99%	27,717,603,200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec. T. Riattang Barat		4332 Rekening	24,250,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec. T. Riattang Barat		4332 Rekening	24,250,000,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. T. Riattang Barat		1308 Kali	517,603,200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. T. Riattang Barat		1308 Kali	517,603,200	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat		624 Kali	250,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat		624 Kali	250,000,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1100 SPPD	800,000,000	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1100 SPPD	800,000,000	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. T. Riattang Barat		19 Paket	1,900,000,000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. T. Riattang Barat		19 Paket	1,900,000,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Kondisi Baik	100%	1,593,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Kondisi Baik	100%	1,593,000,000	

ISSN 0022-3816

JSTOR

0022-3816

10.1215/00223816-63-3

http://www.journals.uchicago.edu/journals/jpolitics

http://www.journals.uchicago.edu/journals/jpolitics

http://www.journals.uchicago.edu/journals/jpolitics

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Pembangunan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		1 Paket	100,000,000	Pembangunan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		1 Paket	100,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T. Riattang Barat		2 Unit	510,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T. Riattang Barat		2 Unit	510,000,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		3 Unit	25,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		3 Unit	25,000,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		25 Unit	195,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		25 Unit	195,000,000	
	Pengadaan Mebeleur	Kec. T. Riattang Barat		100 Unit	70,000,000	Pengadaan Mebeleur	Kec. T. Riattang Barat		100 Unit	70,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		3 Paket	195,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		3 Paket	195,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T. Riattang Barat		73 Kali	300,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T. Riattang Barat		73 Kali	300,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		200 Kali	198,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		200 Kali	198,000,000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Kehadiran ASN	100%	33,000,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Kehadiran ASN	100%	33,000,000	

Category	Definition	Example	Notes
1. Basic Information	Demographic details, including age, gender, race, ethnicity, education level, and employment status.	Age: 35 years old; Gender: Female; Race: White; Ethnicity: Hispanic; Education: Bachelor's degree; Employment: Full-time employee at a local company.	This category is crucial for understanding the individual's background and potential risk factors.
2. Health History	Medical history, family history, and current health status, including any chronic conditions, surgeries, and medications.	Chronic conditions: Hypertension, Type 2 Diabetes; Family history: Father has heart disease; Current health: No active symptoms.	Health history is essential for identifying individuals at high risk for certain diseases.
3. Behavioral Factors	Lifestyle habits, including smoking, alcohol consumption, diet, exercise, and stress levels.	Smoking: Non-smoker; Alcohol consumption: Moderate drinker; Diet: Balanced diet; Exercise: Regular exercise; Stress levels: Low stress.	Behavioral factors can significantly impact health outcomes and are often modifiable.
4. Social Determinants	Environmental and social factors that influence health, such as access to healthcare, socioeconomic status, and community support.	Access to healthcare: Good access to medical facilities; Socioeconomic status: Middle-class household; Community support: Strong support from family and friends.	Social determinants play a critical role in overall health and well-being.
5. Mental Health	Psychological and emotional well-being, including mood, anxiety, and cognitive function.	Mood: Positive mood; Anxiety: Low anxiety levels; Cognitive function: Good cognitive function.	Mental health is often interconnected with physical health and requires attention.
6. Physical Examination	Results of a physical examination, including vital signs, height, weight, and laboratory test results.	Vital signs: Blood pressure 120/80 mmHg, heart rate 60 bpm, respiratory rate 18 breaths/min; Height: 5'6"; Weight: 150 lbs; Laboratory results: Normal blood glucose, cholesterol levels within range.	Physical examination findings provide objective data points for assessment.
7. Diagnostic Tests	Results of diagnostic tests, such as imaging studies, biopsies, and laboratory analyses.	Imaging results: Normal heart function; Biopsy results: Non-cancerous tissue sample; Laboratory results: Elevated liver enzymes.	Diagnostic tests help confirm or rule out specific health conditions.
8. Treatment Plan	Individualized treatment recommendations, including medications, therapies, and lifestyle modifications.	Treatment plan: Start statins for cholesterol management; Refer for follow-up with cardiologist; Encourage smoking cessation.	A treatment plan is tailored to the individual's specific needs and health goals.

Note: This template is a general guide. Specific fields may vary based on clinical guidelines and institutional requirements. It is important to adapt the template to fit your organization's needs and ensure it includes all relevant information for patient care.

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kec. T. Riattang Barat		110 Set	33,000,000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kec. T. Riattang Barat		110 Set	33,000,000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Percentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik	100%	357,500,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Percentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik	100%	357,500,000	
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Kec. T. Riattang Barat		3 Orang	69,000,000	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Kec. T. Riattang Barat		3 Orang	69,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat		12 ASN	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat		12 ASN	50,000,000	
	Sosialisasi Pajak	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	38,500,000	Sosialisasi Pajak	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	38,500,000	
	Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Luar Provinsi		2 Kegiatan	200,000,000	Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Luar Provinsi		2 Kegiatan	200,000,000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Percentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan	100%	264,000,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Percentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu	100%	264,000,000	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
			tepat waktu								
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. T. Riattang Barat		7 Dokumen	80,000,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. T. Riattang Barat		7 Dokumen	80,000,000	
	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	Kec. T. Riattang Barat		792 Kali	95,000,000	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	Kec. T. Riattang Barat		792 Kali	95,000,000	
	Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Kec. T. Riattang Barat		12 Laporan	89,000,000	Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Kec. T. Riattang Barat		12 Laporan	89,000,000	
6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Percentase SP2D yang terbit Kurang 2 (dua) hari Terhadap SP2D yang terbit	100%	220,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Percentase SP2D yang terbit Kurang 2 (dua) hari Terhadap SP2D yang terbit	100%	220,000,000	
	Peningkatan Plaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah Oleh Bendahara Umum Daerah	Kec. T. Riattang Barat		8126 SP2D	220,000,000	Peningkatan Plaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah Oleh Bendahara Umum Daerah	Kec. T. Riattang Barat		8126 SP2D	220,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
7	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	100%	122,000,000	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	100%	122,000,000	
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang Barat		6 Dokumen	37,000,000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang Barat		6 Dokumen	37,000,000	
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang Barat		25 Berita	15,000,000	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang Barat		25 Berita	15,000,000	
8	Promosi dan pameran pembangunan	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	70,000,000	Promosi dan pameran pembangunan	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	70,000,000	
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	15.76%	6,079.594,000	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	15.76%	6,079,594,000	
			Ketetapan waktu penetapan APBD dan perubahan APBD sesuai ketentuan	Tepat Waktu				Ketetapan waktu penetapan APBD dan perubahan APBD sesuai ketentuan	Tepat Waktu		
			Persentase Belanja Tidak langsung terhadap total APBD	50.00%				Persentase Belanja Tidak langsung terhadap total APBD	50.00%		

1978-1979  
Yearly Summary Report  
of the  
National Survey of the  
Health and  
Nursing of  
the  
Aged

1979-1980  
Yearly Summary Report  
of the  
National Survey of the  
Health and  
Nursing of  
the  
Aged

1980-1981  
Yearly Summary Report  
of the  
National Survey of the  
Health and  
Nursing of  
the  
Aged

1981-1982  
Yearly Summary Report  
of the  
National Survey of the  
Health and  
Nursing of  
the  
Aged

1982-1983  
Yearly Summary Report  
of the  
National Survey of the  
Health and  
Nursing of  
the  
Aged

1983-1984  
Yearly Summary Report  
of the  
National Survey of the  
Health and  
Nursing of  
the  
Aged

1984-1985  
Yearly Summary Report  
of the  
National Survey of the  
Health and  
Nursing of  
the  
Aged

1985-1986  
Yearly Summary Report  
of the  
National Survey of the  
Health and  
Nursing of  
the  
Aged

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
			Persentase Belanja Pendidikan Terhadap total APBD	21.96%				Persentase Belanja Pendidikan Terhadap total APBD	21.96%		
			Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD secara Benar	86.36%				Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD secara Benar	86.36%		
			Persentase Penyajian LSKPD sesuai SAP berbasis akrual	97.49%				Persentase Penyajian LSKPD sesuai SAP berbasis akrual	97.49%		
			Persentase Penyaluran Belanja Daerah	97.59%				Persentase Penyaluran Belanja Daerah	97.59%		
			Persentase SILPA terhadap total APBD	2.41%				Persentase SILPA terhadap total APBD	2.41%		
			Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan	29.86%				Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan	29.86%		



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
			Persentase Belanja Langsung Terhadap APBD	50.00%				Persentase Belanja Langsung Terhadap APBD	50.00%		
			Persentase Belanja Modal Terhadap APBD	30%				Persentase Belanja Modal Terhadap APBD	30%		
	Penyusunan Analisa Standar Belanja Pengelolaan Keuangan Daerah			1 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Analisa Standar Belanja Pengelolaan Keuangan Daerah			1 Dokumen	100,000,000	
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	125,000,000	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	125,000,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	658,718,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	658,718,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	270,400,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	270,400,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	168,250,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	168,250,000	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	290,850,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	290,850,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	239,200,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	239,200,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	228,592,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	228,592,000	
	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	244,000,000	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	244,000,000	
	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	9 Kegiatan	338,000,000	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	9 Kegiatan	338,000,000	
	Peningkatan Manajemen Aset/ BarangDaerah	Kec. T. Riattang Barat		3 Laporan	256,000,000	Peningkatan Manajemen Aset/ BarangDaerah	Kec. T. Riattang Barat		3 Laporan	256,000,000	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		132 DPA/DPPA	235,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		132 DPA/DPPA	235,000,000	
	Pengamanan Aset Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	180,000,000	Pengamanan Aset Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	180,000,000	
	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	115,544,000	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	115,544,000	
	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	120,640,000	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	120,640,000	
	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Kec. T. Riattang Barat		2 Kegiatan	50,000,000	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Kec. T. Riattang Barat		2 Kegiatan	50,000,000	
	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	65,000,000	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	65,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	70,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	70,000,000	
	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1570 Faktur	122,000,000	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1570 Faktur	122,000,000	

故人之子，亦復何似？

the first time, and I have been told that it is a very good one. The author is a man of great knowledge and experience, and his book is well worth reading. It is a valuable addition to the literature of the subject.

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Laporan	134,000,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Laporan	134,000,000	
	Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	296,400,000	Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	296,400,000	
	Pengelolaan administrasi data kearsipankeuangan	Kec. T. Riattang Barat		12 Kali	20,000,000	Pengelolaan administrasi data kearsipankeuangan	Kec. T. Riattang Barat		12 Kali	20,000,000	
	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Kec. T. Riattang Barat		5025 SPM	280,000,000	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Kec. T. Riattang Barat		5025 SPM	280,000,000	
	Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		12 Laporan	257,000,000	Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		12 Laporan	257,000,000	
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	350,000,000	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	350,000,000	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		792 Laporan	198.000,000	Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		792 Laporan	198,000,000	
	Pelaporan Aset	Kec. T. Riattang Barat		2 Laporan	130,000,000	Pelaporan Aset	Kec. T. Riattang Barat		2 Laporan	130,000,000	
	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Kec. T. Riattang Barat		15 HGB	142,000,000	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Kec. T. Riattang Barat		15 HGB	142,000,000	
	Pengelolaan Gaji	Kec. T. Riattang Barat		112464 PNS	245,000,000	Pengelolaan Gaji	Kec. T. Riattang Barat		112464 PNS	245,000,000	
	Penyusunan Ramperda dan Ranperkada terkait pengelolaan keuangan	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	150,000,000	Penyusunan Ramperda dan Ranperkada terkait pengelolaan keuangan	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	150,000,000	
9	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase tindak lanjut temuan kerugian negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR	98%	160.000,000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase tindak lanjut temuan kerugian negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR	98%	160,000,000	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Peningkatan Pelaksanaan TGR	Kec. T. Riattang Barat		12 Kasus	160,000,000	Peningkatan Pelaksanaan TGR	Kec. T. Riattang Barat		12 Kasus	160,000,000	

--

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 89 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2020 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Namun demikian terkait dengan usulan alokasi untuk hibah bansos, BPKAD mengalokasikan anggaran dalam belanja tidak terduga dan belanja transfer berdasar rekomendasi di OPD yang sesuai kewenangannya.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

##### **Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri RI**

Adapun Visi Kementerian Dalam Negeri RI adalah "*Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Berdasarkan Visi tersebut Kemendagri merumuskan tujuan yaitu diantaranya "*Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah*", dengan sasaran strategis meningkatkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Kemendagri RI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

##### **1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif.**

Partisifatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

##### **2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.**

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

##### **3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien**

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

##### **4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.**

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

##### **5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.**

卷之三

在於，這就是我們的問題。我們要怎樣才能把這問題解決？

1. *Policy* and *Practice* in *Healthcare* and *Health* 33

• The next year, the first edition of the book was published.

After several months, we were granted permission to go to the city of Tashkent, the capital of Uzbekistan, with the right to travel to the Tajikistan border. This was the first time I had been outside of Kyrgyzstan since my arrival. We took a train to Tashkent, where we stayed at a guesthouse run by a Kyrgyz woman who had married a local Uzbek man. She had three sons, one of whom was a young boy of about 10 years old. He was very curious about us and asked many questions about our country and our culture. He also spoke some English, which made it easier for us to communicate. We spent a few days in Tashkent, exploring the city and meeting other Kyrgyz people. We also visited the Bokhara and Samarkand regions, which were very interesting. We saw many ancient monuments and learned about the rich history of the region. Overall, it was a great experience to travel outside of Kyrgyzstan and learn more about the diverse cultures of Central Asia.

[This is a draft of a letter to the editor of the *Journal of Clinical Endocrinology*.]

第二步：选择要插入的幻灯片，单击“插入”→“幻灯片”→“新幻灯片”，插入新幻灯片。

Journal of Management Education, Vol. 37, No. 7, November 2013, pp. 937–957  
ISSN: 1052-5024 print / 1098-2633 online  
DOI: 10.1177/1052502413488030  
<http://jme.sagepub.com>

Part 2: The Second Stage of the Project: The Development of the Model

本办法自发布之日起施行，原《关于加强和规范中央企业投资项目后评价工作的通知》（国资发评价〔2013〕16号）同时废止。

• **Project** **Goal:** anything related to the project you are working on.

1996-01-01 1996-01-01 1996-01-01 1996-01-01

negative results in the first study and positive in the second.

（六）部門與部門之間的溝通，可以加強彼此的瞭解，減少誤解和衝突。

中華人民共和國農業部農業科學院植物保護研究所編著《中國農業科學》

第二章 市場競爭力評估：競爭對手分析、競爭優勢與競爭弱點

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 33, No. 4, December 2008  
DOI 10.1215/03616878-33-4 © 2008 by The University of Chicago

Digitized by srujanika@gmail.com

Fig. 1. The effect of the addition of 10% of polyacrylate on the properties of the polymer.

THE SPANISH-AMERICAN WAR IN HISTORICAL PERSPECTIVE

19. The following table shows the number of hours worked by each employee.

Statistical methods for the analysis of longitudinal data

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemendagri RI telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategis sebagai berikut:

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
2. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi /Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
3. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
4. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah
5. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
6. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
7. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fisikal daerah;

Mengkaji visi dan misi Kementerian Dalam Negeri RI memberikan tantangan bagi BPKAD Kabupaten Bone untuk:

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone secara tepat waktu;
2. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatkan kualitas belanja pada pelayanan masyarakat, terutama bidang infrastruktur 5%, bidang kesehatan 10%, dan bidang pendidikan 20%; dan
4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan fiscal daerah.

and the number of individuals per unit area. This approach has been applied to large-scale oilseed production systems in Australia and New Zealand, and to small-scale systems in India and Bangladesh.

and the following day, he was able to get a job as a waiter at a local restaurant.

Received by Library and Archives Canada in 2010  
Copies of this document may be reproduced for  
internal distribution, research, teaching, and  
reference purposes only. It is the responsibility of  
the user to respect the copyright information  
that appears on the document.

the regeneration and growth of normal tissue after radiotherapy

John, Daniel, & Frankfort, Frankfort, Kentucky, April 1.  
Dear Friends, We have just received your kind  
address and will be pleased to receive your kind  
attention to our present difficulties.

After the first month, results were mixed, with some areas showing significant improvements in water quality and others showing minimal changes.

Patients with HCV-associated liver fibrosis and cirrhosis had increased plasma levels of vimentin protein.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI adalah "*Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif*"

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diembang adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kabupaten Bone untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

#### **Telaah Renstra Kementerian Keuangan RI**

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan RI yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yakni sebagai berikut:

Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, melalui strategi:

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:

- a. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang berkualitas;
  - b. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan
- Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka Perencanaan anggaran yang berkualitas adalah:
- 1) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;

and I think it's important to have a clear understanding of what's involved in the process. I believe that by following these steps, you can increase your chances of success and minimize the risk of failure.

First, it's important to identify your goals and objectives. This will help you to focus your efforts and ensure that you're working towards something meaningful. Once you've identified your goals, it's time to research and plan. This involves gathering information about the industry, the competition, and the market. It's also important to consider your own strengths and weaknesses, as well as the resources available to you. This will help you to develop a realistic plan that takes into account all relevant factors.

Next, it's time to execute your plan. This involves taking action and making things happen. It's important to stay focused and persistent, even if things don't go as planned. You may encounter setbacks and challenges along the way, but it's important to keep moving forward and learn from your mistakes. It's also important to communicate effectively with your team and stakeholders, as this will help to ensure that everyone is aligned and working towards the same goal.

Finally, it's time to evaluate and refine your plan. This involves looking back at what worked and what didn't, and making adjustments as needed. It's important to be open to feedback and willing to make changes, as this will help you to improve and succeed in the long run.

- 2) Pencanangan program penghematan dengan pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dan pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (quick wins);
  - 3) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;
  - 4) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
  - 5) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat mandatory spending seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa dan lainnya;
  - 6) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energy;
  - 7) Peningkatan sinergi dan kapasitas stakeholders penganggaran.
- Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan adalah;
- 1) Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap dan adekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - 2) Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;
  - 3) Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan;
  - 4) Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi efektif dan efisien;
  - 5) Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan pinjaman dan diminati oleh daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penyediaan pelayanan publik;

and the resulting political conflicts, which were often rooted in religious and cultural divides, could not be easily overcome through the traditional methods of dispute resolution, such as mediation or arbitration. As a result, disputes tended to拖滞 (prolonged) and become chronic, leading to further polarization and gridlock.

为了应对这一挑战，许多国家开始探索新的解决途径。其中一种方法是通过建立独立的司法机构来增强司法系统的公信力和权威性。例如，在中国，最高人民法院设立了巡回法庭，专门处理跨区域的重大案件，从而减少了地方保护主义对司法公正的影响。同时，一些国家还尝试引入多元纠纷解决机制，将传统的诉讼途径与调解、仲裁等非诉讼方式结合起来，以提高效率和灵活性。

然而，尽管这些改革取得了一定成效，但全球化的深入发展和复杂多变的国际形势，使得冲突的解决依然面临着诸多挑战。例如，在涉及领土争端、资源分配、人权保障等方面的问题上，不同国家和地区的利益往往存在根本性的冲突，难以通过简单的对话或妥协来解决。因此，未来的和平与发展之路，不仅需要各国政府的共同努力，更需要社会各界的广泛参与和支持，共同构建一个更加公平、稳定、繁荣的世界。

- 6) Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif;
- 7) Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang bersifat spesifik;
- 8) Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar.

#### **Telaah Renstra Badan Pemeriksa Keuangan RI**

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-2020, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai berikut:

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, melalui strategi:

Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu:

- a. Komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa;
- b. Komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan

Während die ältere Theorie von der sozialen Identität eine soziale Identität als zentrale Dimension des sozialen Selbst verstand, ist die neuere Theorie von der sozialen Identität eine Theorie des sozialen Selbst.

• 第九章 亂世之亂世：民粹派的「新政治」與「新社會」

Table 1. Summary of the results of the study.

W. H. D. 1900-1901

and publishing company, and by the  
same token, the author's name is also published.

For more information, contact [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov) or [www.fcc.gov/encyclopedia](http://www.fcc.gov/encyclopedia).

diagnosed malignant glioma prior to surgery, significant improvements in survival times were observed and were attributed to the implementation of the total intracranial resection technique and improved surgical diagnosis. The results are summarized in Table 1.

the upper body, especially the neck, "providing a good example of the  
ability to support 700 lbs. weight around the neck without breaking the  
skin or muscle." The 1960 study found that the neck was the most common site of  
injury, particularly 24% owing to falls, slips, trips, etc., and 23% from  
injuries to the head and neck, such as falls, etc. Injuries to the neck  
accounted for 90% of all injuries to the head and neck. Injuries to the  
head and neck were the cause of 10% of all deaths.

kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Kementerian Keuangan RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI, maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada

Adapun Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah "*Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib, Taat Aturan, Transparan dan Akuntabel*". Berdasarkan Tujuan tersebut BPKD Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran yaitu "*Optimalisasi Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah*".

#### **Telaahan Renstra BPKD Provinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yakni sebagai berikut:

Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan adalah:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik di 24 kabupaten/kota se sulawesi selatan
2. Mendorong terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik

and the individual's right to privacy. The right to privacy is a fundamental right that is often violated by law enforcement agencies. This violation can lead to a loss of trust in the justice system and can have a negative impact on the individual's mental health. It is important for law enforcement agencies to respect the rights of individuals and to ensure that they are treated fairly and with dignity. This will help to build trust and confidence in the justice system and will ultimately lead to a more just and fair society.

and the first stage of development of the embryo. The second stage of development is characterized by the formation of the head and body segments. The third stage is characterized by the formation of the appendages and the final differentiation of the body segments. The fourth stage is characterized by the formation of the nervous system and the final differentiation of the body segments. The fifth stage is characterized by the formation of the circulatory system and the final differentiation of the body segments. The sixth stage is characterized by the formation of the respiratory system and the final differentiation of the body segments. The seventh stage is characterized by the formation of the excretory system and the final differentiation of the body segments. The eighth stage is characterized by the formation of the immune system and the final differentiation of the body segments. The ninth stage is characterized by the formation of the reproductive system and the final differentiation of the body segments. The tenth stage is characterized by the formation of the nervous system and the final differentiation of the body segments.

It is during the period of adolescence that the child begins to develop his own individuality. This is a period of transition from childhood to manhood or womanhood. The adolescent is learning to make his own decisions and to take responsibility for his actions. He is also learning to relate to others in a more mature way. Adolescence is a time of great physical growth and development, as well as emotional and social maturation. It is a period of great change and transition, and it requires a great deal of guidance and support from parents and other adults.

Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain:

- |           |                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan 1  | : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih |
| Indikator | : 1. Nilai SAKIP BPKAD atas hasil evaluasi<br>Inspektorat/Kemenpan RB<br>2. Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD           |
| Sasaran 1 | : Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKAD dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                      |
| Sasaran 2 | : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efesien, akuntabel dan kompetitif.                     |

**Tabel. 3.2**  
**Matrix Tujuan dan Sasaran**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD atas hasil evaluasi Inspektorat/	Pelayanan administrasi perkantoran	Percantikan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

the next several paragraphs, we will first consider the general nature of the problem of judgment aggregation, and then we will turn to some specific applications of the theory.

As mentioned above, the problem of judgment aggregation concerns the aggregation of individual judgments into a collective judgment. This collective judgment is to be understood as being composed of a set of individual judgments, and it is to be aggregated in accordance with certain rules of aggregation.

For example, suppose that there are two individuals, Alice and Bob, who have different opinions about the same proposition. Alice thinks that the proposition is true, while Bob thinks that it is false. The question is how to aggregate these individual judgments into a single collective judgment. One way to do this is to take a simple majority rule, and say that the collective judgment is true if and only if at least half of the individual judgments are true. This is a common way of aggregating individual judgments into a collective judgment, and it is called a "majority rule".

Another way to aggregate individual judgments into a collective judgment is to take a weighted average of the individual judgments.

For example, suppose that there are two individuals, Alice and Bob, who have different opinions about the same proposition. Alice thinks that the proposition is true, while Bob thinks that it is false. The question is how to aggregate these individual judgments into a single collective judgment. One way to do this is to take a weighted average of the individual judgments, where the weights are determined by the importance of each individual's opinion.

Another way to aggregate individual judgments into a collective judgment is to take a weighted average of the individual judgments, where the weights are determined by the importance of each individual's opinion.

Another way to aggregate individual judgments into a collective judgment is to take a weighted average of the individual judgments, where the weights are determined by the importance of each individual's opinion.

Another way to aggregate individual judgments into a collective judgment is to take a weighted average of the individual judgments, where the weights are determined by the importance of each individual's opinion.

Another way to aggregate individual judgments into a collective judgment is to take a weighted average of the individual judgments, where the weights are determined by the importance of each individual's opinion.

Another way to aggregate individual judgments into a collective judgment is to take a weighted average of the individual judgments, where the weights are determined by the importance of each individual's opinion.

Another way to aggregate individual judgments into a collective judgment is to take a weighted average of the individual judgments, where the weights are determined by the importance of each individual's opinion.

Another way to aggregate individual judgments into a collective judgment is to take a weighted average of the individual judgments, where the weights are determined by the importance of each individual's opinion.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
barang dacrah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih  Indikator: 1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP BPKAD	dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kcmcnpan RB	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas
				Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur
				Penigkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya ASN yang memahami tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik
				Peningktatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kesesuaian laporan kinerja dan keuangan yang ditetapkan tepat waktu
				Penunjang Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas dokumen acuan pelaksanaan program kegiatan
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efesien, akuntabel dan kompetitif	Opini BPK-RI berdasarkan hasil audite terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase SP2D yang terbit kurang 2 (dua) hari terhadap SP2D yang terbit	Persentase SP2D yang terbit kurang 2 (dua) hari terhadap SP2D yang terbit
				Ketepatan waktu penetapan APBD	Ketepatan waktu penetapan APBD
				Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrual	Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrual
				Persentase penyaluran belanja daerah	Persentase penyaluran belanja daerah
				Persentase penyajian laporan Barang Milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang	Persentase penyajian laporan Barang Milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang
			Penigkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan KDH	Persentase bidang lahan asset daerah yang bersertifikat hak guna bangunan	Persentase pengembalian atas kerugian negara

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kabupaten Bone. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BPKAD)

the first time, and the first time I have seen it. It is a very large tree, and has a very large trunk. The bark is rough and textured, and the leaves are large and green. The tree is located in a park, and there are other trees and bushes around it. The sky is clear and blue, and the sun is shining brightly. The overall atmosphere is peaceful and serene.

the first time, and I am sure it will be the last. I have been to the same place twice before, and I have never seen such a sight as I did there yesterday. The country is very flat, and the trees are all dead or dying. The ground is covered with a thick layer of sand, and the water is very shallow. The people are poor and hungry, and they are living in tents made of dried leaves. The children are playing in the water, and the adults are working in the fields. The sky is clear and blue, and the sun is shining brightly. It is a sad sight, but it is a reality. I hope that something can be done to help these people.

Journal of Health Politics, Policy and Law

the same time, the *lateral* and *anterior* lobes of the brain receive

mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan penggerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2020 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memerhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah. Pemerintahan provinsi /Kabupaten /Kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah dengan tetap memerhatikan RPJMD.
2. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penataan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perundang-undagan dibidang pengelolaan keuangan sendiri.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan ,serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan system akuntansi pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

在1950年，中國人民解放軍在抗美援朝戰爭中擊落了幾架美國飛機，這標誌著中國人民解放軍空軍的成立。

It is also likely that management will have to make some changes in their quantity and quality of labor force to meet the demand for the number of labor force required for the industry's production. This may be due to the fact that there is a large number of highly skilled workers in the industry, which requires them to be used in different types of labor force required for the production. The industry's management must take into account the fact that the labor force required for the production of the industry's products is not necessarily the same as the labor force required for the production of other industries.

the 100 individuals represented reached a mean age of 18.8 years at the time of their study.<sup>1</sup> The authors find no significant change in the mean age of 18.8 years, and conclude that the

and the different species, probably as a result of each species' different feeding behaviour. The described diet is similar to that reported by other authors for the same species in different regions (SILVESTRINI & VITALE, 1983; BONOMI, 1985; BONOMI & VITALE, 1986), although the latter authors did not include the *Macrouridae*. Moreover, the diet of *S. macrourus* seems to be more similar to that of *S. squalidus* than to that of *S. macrourus*, which is probably due to the greater size of the specimens of *S. squalidus* examined compared with those of *S. macrourus*. In fact, the proportion of fish in the diet of the latter is higher than in that of the former, while the proportion of cephalopods is lower.

- 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan pada upaya –upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK RI;
  5. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memerhatikan petunjuk teknis kementerian /lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang koordinasi penyusunan petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
  6. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintahan daerah permanen dan nonpermanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan pemerintahan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah;
  7. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten /kota ke provinsi dan kepusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Bone dalam menyusun program dan kegiatan bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

**1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- 2) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- 3) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

which is to be approached by a direct path from the south, and which will be crossed by a bridge. The bridge will be built across the river, and will be supported by two pillars. The pillars will be made of stone, and will be topped with a small tower. The bridge will be wide enough for two horses to pass side-by-side. The path leading to the bridge will be paved with stones, and will be lined with trees. The bridge will be a symbol of peace and prosperity, and will be a welcome sight to all who travel along the road.

- 2. Administrasi Keuangan**
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 3) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
  - 4) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
  - 5) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 3. Administrasi Umum**
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
  - 8) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - 9) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - 10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - 11) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - 12) Pengadaan Mebeleur
  - 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - 15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - 16) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
- 4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  - 2) Pengadaan Pakaian Korpri
  - 3) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
  - 4) Pendidikan dan Pelatihan Formal
  - 5) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  - 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

- 5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 8. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pengadaan Mebel
  - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Mebel
  - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 12. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
- 1) Penyusunan KUA dan PPAS
  - 2) Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  - 3) Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
  - 4) Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
  - 5) Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
  - 6) Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
  - 7) Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
  - 8) Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
  - 9) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- 13. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
- 1) Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
  - 2) Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D

在於此，故其後人之學，亦復以爲子思之傳。蓋子思之學，實出於孟子，而孟子之學，又實出於子思也。

and the first stage of the process is to identify the main components of the system. This is done by examining the system's behavior and identifying the key variables that influence it. The second stage is to build a mathematical model of the system, which can be used to predict its behavior under different conditions. This involves identifying the relationships between the variables and determining the parameters that govern them. The third stage is to analyze the model and determine the optimal operating conditions for the system. This involves solving the equations of the model and finding the values of the parameters that result in the desired outcome. The fourth stage is to validate the model by comparing its predictions with experimental data. This involves testing the model under different conditions and adjusting the parameters until the predictions are accurate. The fifth stage is to use the validated model to make predictions about the system's behavior under new conditions. This involves using the model to predict the effects of changes in the system's parameters or external factors. The sixth stage is to use the model to optimize the system's performance. This involves finding the best values for the parameters that result in the highest efficiency or lowest cost. The seventh stage is to use the model to identify potential problems and suggest ways to mitigate them. This involves analyzing the model's predictions and identifying any potential issues that could arise. The eighth stage is to use the model to make recommendations for future research. This involves identifying the areas where further research is needed to improve the model's accuracy and predictive power.

Group 1: The first group of patients had a history of hypertension and/or diabetes mellitus. They were all receiving antihypertensive and/or anti-diabetic therapy. The mean age was 58 years (range 30-75). The mean systolic blood pressure was 150 mmHg (range 110-200) and the mean diastolic blood pressure was 80 mmHg (range 60-110). The mean HbA<sub>1c</sub> was 7.2% (range 5.7-9.0).

在於此處，我所見到的，是中國人對外國人的一種不平等的對待。這就是說，中國人對外國人，是沒有平等的對待的。這就是說，中國人對外國人，是沒有平等的對待的。

1976年1月1日，中華人民共和國政府和蒙古人民共和國政府在烏蘭巴托簽訂了《關於互派大使的聯合公報》。根據該公報，兩國政府決定互派大使，並就互派大使的有關問題達成如下協議：

On January 1, 1940, the U.S. Fish and Wildlife Service issued a permit to the Missouri Department of Conservation authorizing the use of 100,000 pounds of live bait for the purpose of catching fish for scientific purposes. The permit was issued under the authority of the Migratory Bird Treaty Act of 1918, which provides that the Secretary of the Interior may issue permits for the taking of migratory birds for scientific purposes.

Consequently, the following table gives the results of the experiments.

- 3) Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
- 4) Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- 5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
- 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
- 7) Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

**14. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
- 4) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 5) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 6) Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial
- 7) Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

**15. Kegiatan Penunjang Urusan**

- 1) Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

**16. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- 11) Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

**17. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

1995年1月1日开始施行的《中华人民共和国预算法》第45条第1款规定：“国务院和地方各级人民政府应当在每一预算年度开始前编制预算草案。”

and English) into modern-day English. It is quite remarkable how much of the original meaning and purpose can still be inferred from the text, and how it has been preserved.

• 第二章 算法设计与分析

在於「中華人民共和國」的名稱上，中國人民民主專政的政體和人民民主統一戰線的政策，是不能不考慮到的。

如上所述，虽然在某些情况下，通过增加一个或多个参数，可以显著提高模型的泛化能力，但这种做法可能会导致过拟合。因此，在实际应用中，应根据具体需求和数据情况，合理选择模型结构和参数。

在這段時間，我會繼續研究和學習，並努力將所學應用於實際工作。希望能夠通過自己的努力，為公司貢獻一份力量。

Alles andere als eine Kritik ist es, wenn man die Ergebnisse einer Untersuchung kritisch bewertet. Es ist jedoch falsch, wenn man die Ergebnisse einer Untersuchung kritisiert, ohne sie zu verstehen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

For example, if you have a variable `name` containing the value "John", you can use the `format!` method to print it to the console:

Continued support from the individual and family members is important to the patient's recovery.

Consequently, the first step in the analysis of the data is to determine the number of clusters in the data set.

Le persone che hanno vissuto la vita di Gesù sono state chiamate "discipoli".

The following is a general outline of the information which will be required to complete the application:

and different people. This is what we have now, and that's the situation that we're in.

Highly developed and refined, the *Shōwa* style is characterized by its bold, expressive, and dynamic brushwork.

Figure 11 shows the results of the model with a single parameter varied. The parameter varied is the initial condition of the system.

the following definitions: *parent* means the natural or adoptive parent of a child; *guardian* means a person appointed by a court to act as the legal representative of a minor child; *dependent* means a child under the age of 18 years who is related to the parent by blood, marriage, or adoption, or a child under the age of 18 years who is not related to the parent by blood, marriage, or adoption, but who is financially dependent upon the parent.

Chapter 10: The History of the United States from the Civil War to the Present

Ward 4: "I am not too enthusiastic about the new law, but I think it is a good law and it must be implemented," he said.

- 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- 5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 7) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**18. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 5) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 6) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 7) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

**19. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**20. Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
- 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 5) Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 6) Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
- 7) Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
- 8) Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 9) Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

the original, "I believe, in the first instance, in the right of the people to govern themselves." The author of the "Confederate Constitution" was a Virginian, and he had no desire to interfere with the internal government of the states. He believed that the states had the right to govern themselves, and that the federal government should not interfere with their internal affairs. He also believed that the states had the right to secede from the Union if they so desired. He believed that the federal government should not interfere with the states' right to secede.

After the initial period of uncertainty, the market has come to terms with the new reality. The price of oil has stabilised around \$40 per barrel, and the market is no longer dominated by the fear of supply disruption. The market is now more focused on the demand side, and the impact of economic growth on oil prices.

在於此者，則當以爲是。故曰：「吾子之謂與？」

Während die ersten beiden Takte der Melodie auf dem Bass eine Art Schlagwerk darstellen, ist die Melodie im Tenor und Sopran durchgehend gleichmäßig gespielt.

decreasing the number of nodes in each layer of the neural network. In addition, the number of hidden layers is also decreased.

1937年1月1日，中華人民共和國政府在南京成立，並於1月25日向聯合國政府委員會提出加入聯合國的申請。聯合國政府委員會在1937年1月25日的會議上，一致同意中國成為聯合國成員。

Finally, it is recommended that the following research agenda be pursued in the future: (1) further investigation of the relationship between the physical environment and health; (2) further investigation of the relationship between the social environment and health.

Based on the above information, it is  
concluded that the proposed  
methodology can be used to  
determine the

Finally, the general behavior is summarized. A comparison of the different types of measurement is made by the author, and the results are discussed.

10) Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

## **21. Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- 1) Penyusunan Standar Harga
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4) Pengamanan Barang Milik Daerah
- 5) Penilaian Barang Milik Daerah
- 6) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 7) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 8) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Alleged "Harm" and "Endangerment" by the Family Court  
and the State: A Comparative Analysis

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Kebijakan umum sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih yang selanjutnya ditentukan program pembangunan daerah dan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone. Rencana kerja dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan unit kerja. Secara keseluruhan rencana kerja dan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kabupaten Bone pada Tahun Anggaran 2021 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 547.401.593.870,00,- terdiri dari:

1. Belanja Operasi, sebesar Rp.73.018.290.730,00 dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD, tunjangan daerah dan iuran Askzes PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
2. Belanja Modal sebesar Rp.470.405.000,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 20.000.000.000,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 453.912.898.140,00

Tabel.4.1  
Rencana Belanja BPKAD Tahun 2021

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Belanja Operasi	73.018.290.730,00	13,34%
2	Belanja Modal	470.405.000,00	0,09%
3	Belanja Tak Terduga	20.000.000.000,00	3,65%
4	Belanja Transfer	453.912.898.140,00	82,92%
	<b>JUMLAH</b>	<b>547.401.593.870,00</b>	<b>100.00</b>

（三）在地圖上標明各項指標，並說明其意義。

Tabel 4.2  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

No	RENCANA TAHUN 2021								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
					73,018,290,730.00	470,405,000.00	20,000,000,000.00	453,912,898,140.00	547,401,593,870.00	602,141,753,257.00
	<b>BIDANG SEKRETARIAT BPKAD</b>								<b>63,831,365,650.00</b>	<b>70,214,502,215.00</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				63,360,960,650.00	470,405,000.00	-	-	63,831,365,650.00	70,214,502,215.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				389,502,350.00	-	-	-	389,502,350.00	428,452,585.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		177,495,450.00	-	-	-	177,495,450.00	195,244,995.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		28,948,500.00	-	-	-	28,948,500.00	31,843,350.00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		23,241,000.00	-	-	-	23,241,000.00	25,565,100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20,311,100.00	-	-	-	20,311,100.00	22,342,210.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		99,363,300.00	-	-	-	99,363,300.00	109,299,630.00

## 1. What is the relationship between the two main characters?

John and Mary are best friends. They have been friends since they were children. They are very close and always support each other.

John is a successful businessman and Mary is a stay-at-home mother. They both work part-time jobs to help support their family.

John and Mary are very different in many ways. John is outgoing and likes to socialize while Mary is more introverted and prefers to stay at home.

John and Mary have a strong bond and are always there for each other. They are a great example of true friendship.

John and Mary are best friends. They have been friends since they were children. They are very close and always support each other.

John is a successful businessman and Mary is a stay-at-home mother. They both work part-time jobs to help support their family.

John and Mary are very different in many ways. John is outgoing and likes to socialize while Mary is more introverted and prefers to stay at home.

John and Mary have a strong bond and are always there for each other. They are a great example of true friendship.

John and Mary are best friends. They have been friends since they were children. They are very close and always support each other.

John is a successful businessman and Mary is a stay-at-home mother. They both work part-time jobs to help support their family.

John and Mary are very different in many ways. John is outgoing and likes to socialize while Mary is more introverted and prefers to stay at home.

John and Mary have a strong bond and are always there for each other. They are a great example of true friendship.

John and Mary are best friends. They have been friends since they were children. They are very close and always support each other.

John is a successful businessman and Mary is a stay-at-home mother. They both work part-time jobs to help support their family.

John and Mary are very different in many ways. John is outgoing and likes to socialize while Mary is more introverted and prefers to stay at home.

John and Mary have a strong bond and are always there for each other. They are a great example of true friendship.

No	RENCANA TAHUN 2021								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40,143,000.00	-	-	-	-	40,143,000.00 44,157,300.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40,262,760,430.00	-	-	-	-	40,262,760,430.00 44,289,036,473.00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40,262,760,430.00	-	-	-	-	40,262,760,430.00 44,289,036,473.00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	355,761,000.00	-	-	-	-	355,761,000.00 391,337,100.00	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	125,500,000.00	-	-	-	-	125,500,000.00 138,050,000.00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30,261,000.00	-	-	-	-	30,261,000.00 33,287,100.00	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00 220,000,000.00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,645,501,340.00	-	-	-	-	2,645,501,340.00 2,910,051,474.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	435,646,600.00	-	-	-	-	435,646,600.00 479,211,260.00	



No	RENCANA TAHUN 2021								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
4		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	125,436,720.00	-	-	-	-	125,436,720.00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	693,389,520.00	-	-	-	-	693,389,520.00	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	273,558,500.00	-	-	-	-	273,558,500.00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300,000,000.00	-	-	-	-	300,000,000.00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	817,470,000.00	-	-	-	-	817,470,000.00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	470,405,000.00	-	-	470,405,000.00	
		Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	15,500,000.00	-	-	15,500,000.00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	454,905,000.00	-	-	454,905,000.00	



No	RENCANA TAHUN 2021									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19,113,022,260.00	-	-	-	19,113,022,260.00	21,024,324,486.00	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	59,032,000.00	-	-	-	-	59,032,000.00	64,935,200.00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18,281,670,260.00	-	-	-	-	18,281,670,260.00	20,109,837,286.00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	772,320,000.00	-	-	-	-	772,320,000.00	849,552,000.00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				594,413,270.00	-	-	-	594,413,270.00	653,854,597.00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	262,746,000.00	-	-	-	-	262,746,000.00	289,020,600.00	
		Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25,535,470.00	-	-	-	-	25,535,470.00	28,089,017.00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	186,000,000.00	-	-	-	-	186,000,000.00	204,600,000.00	

REVENUE		EXPENSES		NET	
Interest Income	10,327.35	Interest Expense	10,327.35	Interest Income	0.00
Other Income	0.00	Other Expenses	0.00	Other Income	0.00
Capital Receipts	10,000.00	Capital Expenditure	10,000.00	Capital Receipts	0.00
Contribution	0.00	Contribution	0.00	Contribution	0.00
Net Income	0.00	Net Income	0.00	Net Income	0.00
Equity Income	0.00	Equity Income	0.00	Equity Income	0.00
Capital Loss	0.00	Capital Loss	0.00	Capital Loss	0.00
Net Profit	0.00	Net Profit	0.00	Net Profit	0.00
Capital Reserve	20,000.00	Capital Reserve	20,000.00	Capital Reserve	0.00
Capital Surplus	0.00	Capital Surplus	0.00	Capital Surplus	0.00
Net Assets	10,000.00	Net Assets	10,000.00	Net Assets	0.00

No	RENCANA TAHUN 2021									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	120,131,800.00	-	-	-	-	120,131,800.00	132,144,980.00	
<b>BIDANG ANGGARAN</b>									<b>3,352,858,800.00</b>	<b>3,688,144,680.00</b>	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			8,340,835,450.00	-	20,000,000,000.00	453,912,898,140.00	482,253,733,590.00	530,479,106,949.00		
7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			3,352,858,800.00	-	-	-	-	3,352,858,800.00	3,688,144,680.00	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	182,352,250.00	-	-	-	-	182,352,250.00	200,587,475.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	179,696,250.00	-	-	-	-	179,696,250.00	197,665,875.00	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	136,673,000.00	-	-	-	-	136,673,000.00	150,340,300.00	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	136,673,200.00	-	-	-	-	136,673,200.00	150,340,520.00	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	151,688,000.00	-	-	-	-	151,688,000.00	166,856,800.00	

Volume 10 Number 10 October 1972  
pp. 2001-2012

Author(s)	Title	Page
W. J. BREWER, R. L. HARRIS, and D. J. KELLY	Effect of Polymer Structure on the Solubility of Poly(1,3-butadiene) in Polymers	2001
J. C. COOPER and J. M. GOLDBECK	Effect of Chain Length on the Solubility of Polyisobutylene in Polymers	2007
R. L. HARRIS, W. J. BREWER, and D. J. KELLY	Effect of Polymer Structure on the Solubility of Polyisobutylene in Polymers	2011
W. J. BREWER, R. L. HARRIS, and D. J. KELLY	Effect of Polymer Structure on the Solubility of Polyisobutylene in Polymers	2015

Author(s)	Title	Page
A. S. LEVINE and J. M. GOLDBECK	Effect of Polymer Structure on the Solubility of Polyisobutylene in Polymers	2019
A. S. LEVINE and J. M. GOLDBECK	Effect of Polymer Structure on the Solubility of Polyisobutylene in Polymers	2023
A. S. LEVINE and J. M. GOLDBECK	Effect of Polymer Structure on the Solubility of Polyisobutylene in Polymers	2027
A. S. LEVINE and J. M. GOLDBECK	Effect of Polymer Structure on the Solubility of Polyisobutylene in Polymers	2031

No	RENCANA TAHUN 2021								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	151,689,100.00	-	-	-	-	151,689,100.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1,184,647,600.00	-	-	-	-	1,184,647,600.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	566,133,200.00	-	-	-	-	566,133,200.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	438,676,550.00	-	-	-	-	438,676,550.00	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	64,536,000.00	-	-	-	-	64,536,000.00	
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	160,093,650.00	-	-	-	-	160,093,650.00	
<b>BIDANG PERBENDAHARAAN</b>								<b>1,706,041,450.00</b>	<b>1,876,645,595.00</b>	
8	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1,706,041,450.00	-	-	-	1,706,041,450.00	1,876,645,595.00	

## ANSWER

No	RENCANA TAHUN 2021								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	252,951,800.00	-	-	-	-	252,951,800.00 278,246,980.00	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	298,200,700.00	-	-	-	-	298,200,700.00 328,020,770.00	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	160,152,500.00	-	-	-	-	160,152,500.00 176,167,750.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	247,725,000.00	-	-	-	-	247,725,000.00 272,497,500.00	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	132,559,750.00	-	-	-	-	132,559,750.00 145,815,725.00	



No	RENCANA TAHUN 2021									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	216,244,000.00	-	-	-	-	216,244,000.00	237,868,400.00	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	349,233,800.00	-	-	-	-	349,233,800.00	384,157,180.00	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	48,973,900.00	-	-	-	-	48,973,900.00	53,871,290.00	
	<b>BIDANG AKUNTANSI</b>									<b>1,281,935,200.00</b>	<b>1,410,128,720.00</b>
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1,281,935,200.00	-	-	-	1,281,935,200.00	1,410,128,720.00	
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	230,263,600.00	-	-	-	-	230,263,600.00	253,289,960.00	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	248,845,300.00	-	-	-	-	248,845,300.00	273,729,830.00	



No	RENCANA TAHUN 2021								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	493,718,400.00	-	-	-	493,718,400.00	543,090,240.00	
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	87,915,800.00	-	-	-	87,915,800.00	96,707,380.00	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	67,031,200.00	-	-	-	67,031,200.00	73,734,320.00	
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	154,160,900.00	-	-	-	154,160,900.00	169,576,990.00	
	<b>BENDAHARA BANTUAN</b>								<b>475,912,898,140.00</b>	<b>523,504,187,954.00</b>
10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			2,000,000,000.00	-	20,000,000,000.00	53,912,898,140.00	475,912,898,140.00	523,504,187,954.00	

卷之三

It is also important to note that the results of the study were not statistically significant.

10 APR 2003 1055-0001 (2003) 10:1; DOI: 10.1002/anie.10256 © 2003 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

<sup>1</sup> See also the discussion of the relationship between the two concepts in the section on "The Concept of Social Capital."

J. Clin. Psychol., Vol. 39, No. 12, December 1983

对本办法有异议的，可以向市监察机关反映。

No	RENCANA TAHUN 2021								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
11		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2,000,000,000.00	-	-	446,196,378,100.00	448,196,378,100.00	493,016,015,910.00	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	20,000,000,000.00	-	20,000,000,000.00	22,000,000,000.00	
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-	7,716,520,040.00	7,716,520,040.00	8,488,172,044.00	
<b>BIDANG ASET</b>								<b>1,316,494,630.00</b>	<b>1,448,144,093.00</b>	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1,316,494,630.00	-	-	-	1,316,494,630.00	1,448,144,093.00	
Pengelolaan Barang Milik Daerah				1,316,494,630.00	-	-	-	1,316,494,630.00	1,448,144,093.00	
11		Penyusunan Standar Harga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	186,845,150.00	-	-	-	186,845,150.00	205,529,665.00	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	96,864,340.00	-	-	-	96,864,340.00	106,550,774.00	
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	157,210,250.00	-	-	-	157,210,250.00	172,931,275.00	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	218,086,800.00	-	-	-	218,086,800.00	239,895,480.00	

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100
101	102	103	104	105
106	107	108	109	110
111	112	113	114	115
116	117	118	119	120
121	122	123	124	125
126	127	128	129	130
131	132	133	134	135
136	137	138	139	140
141	142	143	144	145
146	147	148	149	150
151	152	153	154	155
156	157	158	159	160
161	162	163	164	165
166	167	168	169	170
171	172	173	174	175
176	177	178	179	180
181	182	183	184	185
186	187	188	189	190
191	192	193	194	195
196	197	198	199	200
201	202	203	204	205
206	207	208	209	210
211	212	213	214	215
216	217	218	219	220
221	222	223	224	225
226	227	228	229	230
231	232	233	234	235
236	237	238	239	240
241	242	243	244	245
246	247	248	249	250
251	252	253	254	255
256	257	258	259	260
261	262	263	264	265
266	267	268	269	270
271	272	273	274	275
276	277	278	279	280
281	282	283	284	285
286	287	288	289	290
291	292	293	294	295
296	297	298	299	300
301	302	303	304	305
306	307	308	309	310
311	312	313	314	315
316	317	318	319	320
321	322	323	324	325
326	327	328	329	330
331	332	333	334	335
336	337	338	339	340
341	342	343	344	345
346	347	348	349	350
351	352	353	354	355
356	357	358	359	360
361	362	363	364	365
366	367	368	369	370
371	372	373	374	375
376	377	378	379	380
381	382	383	384	385
386	387	388	389	390
391	392	393	394	395
396	397	398	399	400
401	402	403	404	405
406	407	408	409	410
411	412	413	414	415
416	417	418	419	420
421	422	423	424	425
426	427	428	429	430
431	432	433	434	435
436	437	438	439	440
441	442	443	444	445
446	447	448	449	450
451	452	453	454	455
456	457	458	459	460
461	462	463	464	465
466	467	468	469	470
471	472	473	474	475
476	477	478	479	480
481	482	483	484	485
486	487	488	489	490
491	492	493	494	495
496	497	498	499	500
501	502	503	504	505
506	507	508	509	510
511	512	513	514	515
516	517	518	519	520
521	522	523	524	525
526	527	528	529	530
531	532	533	534	535
536	537	538	539	540
541	542	543	544	545
546	547	548	549	550
551	552	553	554	555
556	557	558	559	560
561	562	563	564	565
566	567	568	569	570
571	572	573	574	575
576	577	578	579	580
581	582	583	584	585
586	587	588	589	590
591	592	593	594	595
596	597	598	599	600
601	602	603	604	605
606	607	608	609	610
611	612	613	614	615
616	617	618	619	620
621	622	623	624	625
626	627	628	629	630
631	632	633	634	635
636	637	638	639	640
641	642	643	644	645
646	647	648	649	650
651	652	653	654	655
656	657	658	659	660
661	662	663	664	665
666	667	668	669	670
671	672	673	674	675
676	677	678	679	680
681	682	683	684	685
686	687	688	689	690
691	692	693	694	695
696	697	698	699	700
701	702	703	704	705
706	707	708	709	710
711	712	713	714	715
716	717	718	719	720
721	722	723	724	725
726	727	728	729	730
731	732	733	734	735
736	737	738	739	740
741	742	743	744	745
746	747	748	749	750
751	752	753	754	755
756	757	758	759	760
761	762	763	764	765
766	767	768	769	770
771	772	773	774	775
776	777	778	779	780
781	782	783	784	785
786	787	788	789	790
791	792	793	794	795
796	797	798	799	800
801	802	803	804	805
806	807	808	809	810
811	812	813	814	815
816	817	818	819	820
821	822	823	824	825
826	827	828	829	830
831	832	833	834	835
836	837	838	839	840
841	842	843	844	845
846	847	848	849	850
851	852	853	854	855
856	857	858	859	860
861	862	863	864	865
866	867	868	869	870
871	872	873	874	875
876	877	878	879	880
881	882	883	884	885
886	887	888	889	890
891	892	893	894	895
896	897	898	899	900
901	902	903	904	905
906	907	908	909	910
911	912	913	914	915
916	917	918	919	920
921	922	923	924	925
926	927	928	929	930
931	932	933	934	935
936	937	938	939	940
941	942	943	944	945
946	947	948	949	950
951	952	953	954	955
956	957	958	959	960
961	962	963	964	965
966	967	968	969	970
971	972	973	974	975
976	977	978	979	980
981	982	983	984	985
986	987	988	989	990
991	992	993	994	995
996	997	998	999	1000

No	RENCANA TAHUN 2021								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
		Penilaian Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	174,299,200.00	-	-	-	-	174,299,200.00 191,729,120.00	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	113,107,800.00	-	-	-	-	113,107,800.00 124,418,580.00	
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200,009,340.00	-	-	-	-	200,009,340.00 220,010,274.00	
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	170,071,750.00	-	-	-	-	170,071,750.00 187,078,925.00	

1. *Chlorophytum* (L.) Willd.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

*Chlorophytum comosum* (L.) Willd. *Cyperaceae*.  
Common Name: *Spider Plant*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja BPKAD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja BPKAD tahun 2021 merupakan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah tahun kedua RPJMD dan Renstra BPKAD tahun 2018-2023 ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja BPKAD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bone

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Watampone, 25 Desember 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BONE

  
**H. NAJAMUDDIN, S.Sos.,MM**  
Pangkat : Pembina Tingkat I  
NIP. 19631007 198611 1 002

1968

1000 ft.

Wetland area with many small trees, shrubs, and grasses. A small stream flows through the area. The soil is very wet and appears to be peat or muck. There are many small pools of water throughout the area. The trees are mostly small, young ones. The shrubs are mostly low-growing, spreading types. The grasses are mostly tall, clumped species. The overall appearance is one of a wetland area. The soil is very wet and appears to be peat or muck. There are many small pools of water throughout the area. The trees are mostly small, young ones. The shrubs are mostly low-growing, spreading types. The grasses are mostly tall, clumped species. The overall appearance is one of a wetland area.

Wetland area with many small trees, shrubs, and grasses.

Small shrubs and grasses.

Small shrubs and grasses.

Small shrubs and grasses.

Small shrubs and grasses.